

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK MUSDA PERBAUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Tinggi*

Oleh :

NOVIJA JULINAR
NPM : 2020060126



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **NOVIJA JULINAR**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2020060126**
Program Studi : **Magister Manajemen Pendidikan Tinggi**
Konsentrasi :
Judul Tesis : **PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK MUSDA PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



Pengesahan Tesis

Medan, 07 Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. EMILDA SULASMI, M.Pd., CIQnR., CIQaR

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RAHMAN DONGORAN, M.Si

UMSU

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M. Hum

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. INDRA PRASETIA, S.Pd, M.Si., CIQnR

PENGESAHAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK MUSDA PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOVIJA JULINAR

2020060126

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd) Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2023

Komisi Penguji

1. **Prof. Dr. AKRIM, M. Pd**

Ketua

2. **Assoc. Prof. Dr. INDRA PRASETIA, S.Pd,
M.Si., CIQnR**

Sekretaris

3. **Dr. SRI NURABDIAH PRATIWI, M.Pd**

Anggota

1.....

2.....

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK MUSDA PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 07 Maret 2023

Penulis



NOVIJA JULINAR

NPM : 2020060126

ABSTRAK

Julinar, Novija Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMK Musda Perbaungan, Tesis, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tahun pelajaran 2022/2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, kepala tata usaha, dan guru. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, dimulai dari perencanaan anggaran mengacu pada raport mutu sekolah. Penggunaan anggaran Dana bantuan operasional sekolah berdasarkan skala prioritas dari pemetaan kebutuhan yang telah disampaikan guru dan warga sekolah yang dialokasikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pengawasan dalam penggunaan anggaran dilakukan oleh pihak internal sekolah dan juga pihak eksternal sekolah. Laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan format yang terdapat dalam petunjuk teknis yang berlaku, Adanya peningkatan terhadap mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan disebabkan pengelolaan Dana anggaran yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pengelolaan, Bos, Mutu Pendidikan.

ABSTRACT

Julinar, Novija Management of School Operational Assistance Funds in Improving the Quality of Education at SMK Musda Perbaungan, Thesis, 2023.

This study aims to describe the management of school operational assistance funds in improving the quality of education at SMK Musda Perbaungan, Serdang Bedagai Regency 2022/2023 academic year. This research is qualitative research with a descriptive approach. In this study, data sources were obtained from the school principal, school committee, treasurer, head of administration, and teacher. The data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation study. The data validity test was carried out by triangulation of techniques and sources. The results of the study show that the management of school operational assistance funds in improving the quality of education at SMK Musda Perbaungan applies the principles of school-based management, starting from budget planning referring to school quality report cards. The use of the school operational assistance fund budget is based on the priority scale from the mapping of needs that have been submitted by teachers and school residents which are allocated in accordance with national education standards. Supervision in the use of the budget is carried out by school internal and external parties. Accountability reports are made in accordance with the format contained in the applicable technical guidelines. There is an increase in the quality of education at SMK Musda Perbaungan due to the management of budget funds that are used effectively and efficiently.

Keywords: Management, School operational assistance, Quality of Education.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya jugalah maka penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini berjudul **“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMK Musda Perbaungan.”** yang diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis berusaha maksimal untuk menyajikan yang terbaik, tapi penulis mengalami hambatan-hambatan yakni terbatasnya bahan-bahan penelitian. Disamping keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat dukungan, usaha, bantuan serta banyaknya masukan dan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak terkait akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini sehingga pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program magister.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Edy, S.H., M. Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan bimbingan

serta arahan yang diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Indra Prasetya, SPd, M. Si, CIQnR, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad. Isman, M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof Dr. Emilda Sulasmi, M. Pd, CIQnR, CIQaR sebagai pembimbing pertama dan Bapak Dr. Faisal Rahman Dongoran, M.Si, sebagai pembimbing kedua yang dengan penuh pengertian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.
7. Kepada ibunda tercinta Rislaini serta ananda tersayang Naira azuhra dan Sabrina Fazia tempat penulis berbagi kasih sayang sepanjang hidup.
8. Bapak Sulaiman, S. Kom selaku Kepala SMK Musda Perbaungan yang memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian.
9. Bapak Darwin Bangun, S. Si, S. Pd selaku Bendahara SMK Musda Perbaungan serta seluruh guru-guru dan pegawai SMP dan SMK Musda Perbaungan. Terakhir sekali penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang begitu baik dan setia. Penulis mohon maaf tidak dapat

menuliskan namanya. Namun, yakinlah nama-nama kalian tetap terpatri di lubuk hati yang paling dalam.

Medan, Maret 2023

Penulis,

Novija Julinar



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	12 s
2.1. Konsep Pengelolaan	12
2.1.1. Pengertian Pengelolaan	12
2.1.2. Unsur Unsur Pengelolaan	14
2.1.3. Fungsi Pengelolaan	18
2.1.4. Prinsip Umum Pengelolaan	25
2.2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33
2.2.1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan	33
2.2.2. Prinsip Dana BOS	36
2.2.3. Komponen Dana BOS	37
2.3. Mutu Pendidikan	38
2.3.1. Definisi Mutu Pendidikan	38
2.3.2. Indikator Mutu Pendidikan	41
2.3.3. Faktor Utama Peningkatan Mutu Pendidikan	43
2.3.4. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan	44
2.3.5. Implementasi Mutu Pendidikan	46

2.4. Kerangka Berpikir	55
2.5. Hasil Penelitian yang Relevan	56
BAB III. METODE PENELITIAN	60
3.1. Jenis Penelitian	60
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	62
3.3. Sumber Data Penelitian	63
3.4. Teknik Pengumpulan Data	64
3.5. Teknik Analisis Data	67
3.6. Keabsahan Data	69
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
4.1.1 Profil Sekolah	72
4.1.2 Sejarah SMK Musda Perbaungan	74
4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah	74
4.1.4 Keadaan Peserta Didik	75
4.1.5 Kompetensi Keahlian	76
4.1.6 Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	77
4.1.7 Keadaan Sarana dan Prasarana	80
4.1.8 Struktur Organisasi	83
4.1.9 Penerimaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan	84
4.2. Temuan Hasil Penelitian	85
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	109
BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	129
5.1. Simpulan	129
5.2. Implikasi	130
5.3. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	63
Tabel 4.1 Profil Sekolah	72
Tabel.4.2 Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023	76
Tabel.4.3 Jumlah Kompetensi Keahlian.....	76
Tabel 4.4 Data Pendidik	77
Tabel 4.5 Data Tenaga Kependidikan	80
Tabel 4.6 Sumber belajar	81
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana	82
Tabel 4.8 Struktur organisasi Smk Musda.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah adalah pendidikan karena pendidikan sebagai pencipta sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap suatu kemajuan bangsa. Sulasmi (2021:35) menyatakan bahwa Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan serba sistematis dengan tujuan untuk pembelajaran dari pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dianggap lebih baik.

Pendidikan merupakan proses dalam rangka meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat guna mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna pendidikan berimplikasi pentingnya pendidikan bagi semua orang (*education for all*). Untuk mendapatkan hasil pendidikan yang memadai bagi semua orang secara berkualitas, maka dibutuhkan pengeluaran atau yang disebut dengan investasi atau biaya pendidikan.

Mulyono (2010:23) menjelaskan bahwa dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di lembaga pendidikan tidak

akan berjalan sesuai harapan. Hal senada dijelaskan Al Kadri (2011:1) bahwa hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Untuk itu dalam pengelolaan pendidikan instrument biaya menjadi urat nadi organisasi/institusi/lembaga pendidikan yang perlu dikelola dengan baik dan profesional. Para pengelola tentu diharapkan memahami pembiayaan pendidikan secara menyeluruh (*holistik*). Sulasmi, (2020:4) menyatakan bahwa Pelaksanaan suatu manajemen tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Dalam hal ini, tujuan penerapan manajemen keuangan sekolah adalah memenuhi kebutuhan penDanaan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah yang bisa dilakukan dengan cara direncanakan lebih dulu, diupayakan pengadaannya, dibukukan dengan transparan dan juga digunakan untuk pembiayaan program sekolah dengan efektif dan efisien.

Diperkuat lagi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan penDanaan pendidikan yaitu pada pasal 11 ayat 2 bahwa didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai usaha melalui kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Upaya mencerdaskan manusia Indonesia, juga telah jelas dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan anggaran pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyalurkan bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia yaitu melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS dimulai sejak bulan Juli tahun 2005. Pada awal dikeluarkannya Program BOS yang menjadi fokus utama adalah pendidikan dasar yakni SD dan SMP serta jenjang pendidikan lain yang sederajat. Peran BOS tersebut telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan hasil yang signifikan terhadap percepatan program wajib belajar 9 tahun.

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan Dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono, 2015:170).

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan Dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.

Sementara dari hasil studi pendahuluan melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMK Musda Perbaungan, dapat dilihat dari profil sekolah bahwasannya SMK Musda sudah memperoleh akreditasi A dan memiliki 67 tenaga pendidik yang seluruhnya tamatan sarjana S1, adanya perangkat kurikulum, adanya komite sekolah, tersedianya ruang perpustakaan, ruang belajar teori, aula, ruang administrasi, ruang ISP, ruang bimbingan konseling, ruang praktek yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), adanya

perjanjian kerjasama DU/DI. Dengan Jumlah siswa laki-laki 1062 siswa dan siswa perempuan 453 siswa dengan jumlah total 1515 siswa, ini menandakan bahwa animo masyarakat untuk mengenyam pendidikan di SMK Musda cukup tinggi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, disamping kekuatan atau keunggulan yang dimiliki SMK Musda masih terdapat kelemahan yang dapat dilihat dari rapor mutu sekolah menunjukkan masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi yang capaian nilainya masih dibawah kompetensi minimum. Keunggulan yang dimiliki sekolah bisa lebih ditingkatkan dan Kelemahan yang dimiliki sekolah dapat diperbaiki dengan pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah ((BOS) yang tepat guna agar bisa meningkatkan mutu Pendidikan di SMK Musda.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK Musda perbaungan maka dibutuhkan rencana strategis dari kepala sekolah (top manajerial) dan tim pengelola Dana BOS untuk dapat bekerjasama dengan baik. Adanya pengelolaan keuangan yang jelas dan tepat akan mempengaruhi operasional dan pendidikan sekolah, oleh karena itu pengelolaan keuangan sekolah sangat penting untuk mengklasifikasikan kebutuhan yang ada pada sekolah mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi hingga laporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan yang mengacu pada delapan standar nasional pendidikan.

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan suatu kegiatan yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi lembaga formal tersebut. Karena posisi keuangan sangat penting untuk mengklasifikasikan kebutuhan harus dijalankan dengan benar dan tepat sasaran, dimulai dari yang ada pada sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Proses perencanaan, pelaksanaan dalam pemanfaatan, evaluasi serta pertanggung jawabannya dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan sekolah. Alasannya, tanpa pengelolaan yang benar tidak mungkin tujuan pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan secara optimal, efisien dan efektif.

Berdasarkan undang-undang Sisdiknas No 20 Pasal 48 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan Dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penyusunan alokasi Dana yang dibutuhkan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), harus menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Tujuan dari petunjuk teknis itu sendiri adalah menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS dan segala peruntukannya dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan menjadi tepat guna.

Demi mewujudkan dan mencapai mutu atau kualitas pendidikan yang baik maka delapan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh

kemendiknas PP no 32 tahun 2013 yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan perlu diterapkan dan dilaksanakan secara hati-hati dan berdaya guna bagi mutu pendidikan secara merata.

Menurut Mulyasa (2006:176) untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja.

Dari uraian di atas, dapat ditarik gambaran umum bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penggalan sumber daya biaya, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lembaga pendidikan agar organisasi atau institusi pendidikan berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi. Berdasarkan paparan materi di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan SMK Musda Perbaungan”**



1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian persoalan mengenai lingkup ataupun topik-topik yang hendak dipaparkan ataupun digali dalam penelitian. Fokus penelitian adalah garis besar dari observasi riset, maka pengamatan serta analisa hasil riset lebih terencana. Oleh karena itu, digunakanlah indikator- indikator supaya tidak terjalin ulasan yang begitu luas serta pada kesimpulannya tidak cocok dengan apa yang menjadi judul riset.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang meliputi 8 standar nasional pendidikan di SMK Musda Perbaungan, dengan Subfokus penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Pengelolaan Dana BOS

- a. Perencanaan anggaran Dana BOS
- b. Pemanfaatan anggaran Dana BOS
- c. Pengawasan dan evaluasi anggaran Dana BOS
- d. Laporan pertanggung jawaban anggaran Dana BOS

1.2.2. Mutu Pendidikan

- a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Peningkatan sarana prasarana sekolah
- c. Peningkatan hasil belajar/prestasi peserta didik

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memilih rumusan masalah yang berhubungan dengan pengelolaan Dana BOS di SMK Musda Perbaungan dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana SMK Musda Perbaungan melakukan perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah?
2. Bagaimana SMK Musda Perbaungan memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
3. Bagaimana SMK Musda Perbaungan melakukan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
4. Bagaimana laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Musda Perbaungan?
5. Standar mutu pendidikan apa saja yang sudah meningkat di SMK Musda Perbaungan?
6. Pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah seperti apakah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Musda Perbaungan.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Operasional di SMK Musda Perbaungan.
3. Untuk mengetahui pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Musda Perbaungan.
4. Untuk mengetahui laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Musda Perbaungan.
5. Untuk mengetahui peningkatan standar mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan.
6. Untuk mengetahui pengelolaan Dana bantuan operasional yang sesuai agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan SMK Musda Perbaungan ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek yang diteliti serta bagi masyarakat luas baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu pengelolaan keuangan, sumber informasi dan tambahan referensi khususnya pada kajian pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu Pendidikan.

1.5.2 Segi Praktis

- a. Bagi pengelola Dana bos, sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan
- b. Bagi peneliti, untuk memberi tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman tentang pengelolaan Dana BOS yang baik dan benar.
- c. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen (administrasi). Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang keseluruhannya mengarah pada pengertian bahwa manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Para pakar mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pengelolaan antara lain:

1. Menurut Arikunto (2010:31): “Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan.

2. Fattah (2009:1) berpendapat: Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
3. Terry (2012:15) mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
4. Rohman&Amri (2012:273) Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;

3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Jadi pengelolaan ialah ilmu manajemen yang berhubungan dengan cara mengurus serta mengatasi suatu untuk menghasilkan tujuan tertentu yang mau diraih. Pengelolaan dimaksud selaku sesuatu susunan profesi ataupun upaya yang dilakukan oleh orang-orang buat melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.

2.1.2. Unsur Pengelolaan

Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu elemen pokok yang harus ada di dalamnya, dimana manajemen tidak akan sempurna bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa kehadiran dari elemen-elemen pokok tersebut. Dengan kata lain, bahwa manajemen tersusun atas elemen-elemen pokok tersebut yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Jonh F. dan Robert V. (1960) mengutip pendapat Emerson, bahwa manajemen mengandung Lima unsur pokok, yang dikenal dengan 5M, yaitu:

1. Manusia/orang (*men*)
2. Uang (*money*)
3. Material (*materials*)

5. Metode/cara (*methods*)

Sedangkan Terry berpendapat dalam bukunya yang berjudul “*Principle of Management*”, bahwa terdapat enam unsur pokok dimana memiliki makna di dalam manajemen, diantaranya:

1. *Men and women* (manusia/orang)
2. *Materials* (material)
3. *Machines* (mesin),
4. *Methods* (metode/cara)
5. *Money* (uang)
6. *Markets* (pasar)

Dari kedua pandangan mengenai unsur-unsur manajemen tersebut, jelas terlihat bahwa manusia merupakan unsur yang paling penting dan tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Manusia memiliki pikiran, harapan, serta gagasan yang sangat berperan dalam menentukan keterbedayaan unsur lainnya. Dengan kualitas manusia yang mumpuni, manajemen akan berjalan secara maksimal, dan sebaliknya dengan kualitas kemampuan manusia yang tidak baik, maka manajemen juga akan banyak mengalami hambatan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia dinilai penting dan harus senantiasa dilakukan, agar dalam penerapan manajemen, baik dalam komunitas (organisasi) maupun dalam konteks personalitas berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selain kemampuan manusia yang memadai, dalam manajemen juga harus terdapat material (bahan-bahan). Karena dalam berbagai aktivitas sebagai proses pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, selalu membutuhkan adanya material (bahan-bahan). Dengan demikian, material juga merupakan alat atau sarana dari manajemen.

Unsur berikutnya yang juga ada dalam manajemen adalah metode/cara, dimana dalam pelaksanaan berbagai kegiatan mencapai tujuan, manusia dihadapkan dengan berbagai alternatif yang harus dipilih salah satunya. Sehingga dengan pemilihan metode/cara kegiatan yang baik dari berbagai alternatif yang ada, pelaksanaan manajemen dalam mencapai tujuan akan berjalan secara tepat dan berhasil guna.

Selanjutnya adalah unsur uang, keberadaannya juga merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Unsur uang sebenarnya bukan merupakan segala-galanya, namun proses manajemen dalam mencapai tujuan sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur ini. Unsur uang membutuhkan perhatian yang baik dalam proses manajemen, karena dengan pengaturan yang baik akan memberikan dampak efisiensi.

Terakhir adalah unsur pasar, khususnya bagi komunitas yang bergerak di bidang industri. Pasar sebagai salah satu unsur pokok dari manajemen karena darinya hasil sebagai tujuan dari suatu komunitas akan didapatkan. Hasil yang

maksimal dalam dunia industri merupakan tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, proses manajemen harus memperhatikan dan mempertahankan pasar yang dimiliki, bahkan harus semakin bertambah.

Sedangkan dari segi proses kerjanya, manajemen juga membutuhkan unsur-unsur sebagai berikut: (1) kegiatan selalu didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses kerja tersebut, unsur ini menjadi dasar dan pedoman bagi setiap manusia yang terlibat dalam proses manajemen, karena hakikat dari manajemen adalah pencapaian tujuan. Sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dimaksud harus berdasarkan pada tujuan itu sendiri; (2) kegiatannya melalui suatu proses yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan. Tahapan proses kegiatan tersebut yang dimaksud dengan adanya unsur metode dalam suatu manajemen; (3) mendapatkan suatu melalui kerjasama dengan orang lain. Unsur ini mengharuskan adanya kerja sama antar manusia yang terlibat, bukan sebaliknya menggunakan kekerasan, kekuatan otot, dan kekerasan dalam pencapaian tujuan; dan (4) adanya unsur ilmu dan unsur seni. Seperti pada argumentasi sebelumnya bahwa manajemen dapat dipandang sebagai suatu ilmu dan seni. Dengan kata lain, dalam proses manajemen harus didasari pada ilmu agar kegiatan dan aktivitas yang dilakukan tepat guna sesuai perkembangan dan kebutuhan.

2.1.3. Fungsi Pengelolaan

Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen, beberapa ahli mengajukan pendapat dengan perspektif masing-masing seperti yang dipaparkan oleh Syafiie dalam kutipan Rohman (2017:22) berikut ini.

Fayol (1916) mengemukakan pandangannya mengenai fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisiran)
3. Commanding (Pengarahan)
4. Coordinating (Pengkoordinasian), Dan
5. Controlling (Pengawasan)

Terry (1964) menyatakan fungsi-fungsi manajemen lazim menggunakan akronim POAC, yaitu:

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisiran)
3. Actuating (Pengaktualisasian)
4. Controlling (Pengawasan)

Menurut Sondang P. Siagian mengenai fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisiran)

3. Motivating (Pemberian Motivasi), Dan
4. Controlling (Pengawasan)
5. Evaluating (Evaluasi)

Dari berbagai pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli tersebut, penulis tidak memberikan penilaian pandangan mana yang paling ideal untuk diterapkan. Karena pada dasarnya, pandangan tersebut dikemukakan berdasarkan asumsi masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan, pengetahuan serta berbagai faktor lainnya. Namun demikian, kendatipun dari sisi jumlah fungsi manajemen tersebut berbeda antara satu sama lain, akan tetapi merujuk pada esensi yang sama. Perbedaan hanya terletak pada penggabungan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya, sedangkan ahli yang lain lebih mendetailkan fungsi-fungsi tersebut.

Kesimpulannya bahwa istilah dari fungsi-fungsi manajemen yang dipaparkan oleh beberapa ahli tersebut meliputi

1. Fungsi Planning (Perencanaan)

Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen. Dalam setiap komunitas (organisasi), dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Planning mencakup kegiatan memilih visi (misi), tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, bahwa berbagai aktivitas yang mendasarkan pada planning yang matang atas seluruh input dan proses yang ada, merupakan titik awal untuk menghasilkan

output yang optimal. Sebaliknya, output yang dihasilkan tidak akan optimal bahkan tidak akan menghasilkan suatu output yang diharapkan apabila aktivitas yang dilakukan tidak dibarengi dengan planning yang matang. Planning juga harus mengcover penentuan kebijakan yang akan dijalankan, proyek, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan guna pencapaian tujuan tersebut.

Dari argumentasi tersebut, planning dipandang sebagai suatu proses pengupayaan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya alam yang ada, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan bahwa planning merupakan fungsi paling mendasar dan paling awal yang harus dilalui untuk melakukan berbagai kegiatan mencapai sebuah tujuan. Arifin & Hadi W. dalam kutipan Rohman (2017:26) mengatakan bahwa dalam kegiatan planning, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

- a. Menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang kemudian menjadi dasar penentuan tujuan-tujuan dari bagian-bagian yang lebih kecil.
- b. Memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan. Hal ini merupakan tahap lanjutan setelah tujuan yang akan dicapai telah ditetapkan.

c. Melakukan peninjauan secara periodik yang dimaksudkan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Organizing (Pengorganisasian)

Wijayanti (2008:10) menyatakan bahwa fungsi ini merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan demikian, secara lebih teknis fungsi organizing merupakan suatu proses dimana fungsi-fungsi operasional, manusia, dan fasilitas terkoordinasikan untuk mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Dalam fungsi ini secara teknis kemudian dipilih oleh sebagian ahli menjadi beberapa fungsi manajemen yang lebih rinci menjadi staffing, facilitating, dan coordinating.

Fungsi organizing ini sangat bergantung pada bentuk organisasi yang ada. Sehingga sangat memungkinkan perbedaan antara organizing (pengorganisasian) pada satu organisasi dengan organisasi yang lain. Arifin & Hadi W dalam kutipan Rohman (2017:27) menambahkan bahwa dalam organizing, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, agar berjalan secara sistematis.

c. Pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan dan keahliannya.

3. Fungsi Actuating (Pelaksanaan)

Fungsi actuating (menggerakkan) menurut Sukwiaty dalam kutipan Rohman (2017:29) dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain, actuating merupakan langkah-langkah pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah melibatkan berarti mengupayakan dan menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya kekuatan yang dapat mengupayakan dan menggerakkan yang disebut kepemimpinan (leadership).

Kepemimpinan (leadership) merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan tulus, sehingga pekerjaan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Leadership merupakan salah satu alat efektif actuating. Artinya, untuk mencapai tujuan, dibutuhkan actuating, sedangkan untuk mencapai actuating yang efektif dibutuhkan leadership, dan di dalam leadership itu sendiri dibutuhkan kemampuan komunikasi, kemampuan memotivasi, serta kemampuan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Paparan di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi actuating secara lebih teknis kemudian dapat dipilah

dalam beberapa fungsi manajemen yang lain, diantaranya fungsi leading dan fungsi motivating seperti yang digunakan oleh beberapa ahli.

4. Fungsi Controlling (Pengendalian/Pengawasan)

Menurut Arifin & Hadi dalam kutipan Rohman (2017:31) controlling (pengawasan) disebut juga sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas (termasuk cara dan peralatan yang digunakan) di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. Arifin & Hadi W. menambahkan, dalam fungsi controlling (pengawasan) ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah: 1) menentukan standar atau tolok ukur prestasi kerja; 2) mengukur hasil kerja dengan standar yang ada; 3) membandingkan prestasi dengan langkah langkah yang telah ditetapkan; dan 4) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolok ukur.

- a. Membandingkan prestasi dengan langkah langkah yang telah ditetapkan;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolok ukur.

5. Fungsi Reporting (Pelaporan)

Menurut Arifin, Imamul & Giana Hadi W dalam kutipan Rohman (2017:31) Fungsi reporting atau pelaporan secara sederhana dapat dimaknai

sebagai upaya penyampaian perkembangan atau hasil dan pemberian keterangan berbagai aktivitas dalam lingkup manajemen yang dilakukan sebuah organisasi. Pelaporan tentunya harus berdasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam menjalankan pekerjaan. Pelaporan dilakukan bawahan kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga yang menerima laporan (atasan/manajer) dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan dalam pencapaian tujuan.

Selain fungsi-fungsi yang telah dipaparkan di atas, sebagian ahli juga mengemukakan beberapa fungsi manajemen lain. Namun demikian, dalam paparan ini tidak dibahas lebih jauh karena pada dasarnya fungsi-fungsi tersebut merupakan pemisahan dari fungsi manajemen yang ada seperti paparan di awal. Beberapa fungsi manajemen yang lain misalnya programing (pemrograman), system (penyusunan sistem), communicating (pengembangan komunikasi), decision making (pengambilan keputusan), improving (peningkatan kemampuan), dan sebagainya.

Di luar fungsi-fungsi tersebut juga ada beberapa fungsi yang oleh sebagian ahli digolongkan pada fungsi yang muncul akhir-akhir ini dan pada umumnya berorientasi pada hubungan antarmanusia, seperti guiding (bimbingan), counseling (penyuluhan), consulting (konsultasi), servicing (pelayanan), correcting (koreksi), evaluating (penilaian), dan sebagainya.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka para ahli manajemen sepakat bahwa formula dasarnya adalah sama, yakni tujuan dapat dicapai secara maksimal, efektif, efisien, apabila mendapat dukungan manajemen yang tepat. Manajemen yang tepat hanya dapat bekerja dengan baik dan lancar, jika mendapatkan dukungan dari informasi yang akurasi tinggi. Sedangkan informasi yang akurasi tinggi adalah informasi yang diolah sesuai dengan kebutuhan manajemen masing-masing unit kerja.

2.1.4 Prinsip Pengelolaan

Menurut Sukwiaty, dkk. (2016:8) prinsip adalah suatu pernyataan mendasar atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip merupakan dasar tetapi tidak bersifat mutlak, karena prinsip bukan hukum. Dalam konteks manajemen, prinsip bersifat fleksibel yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu dan situasi-situasi yang senantiasa berubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kendatipun tidak bersifat mutlak, prinsip-prinsip manajemen merupakan nilai yang menjadi intisari dari sebuah keberhasilan penerapan manajemen.

Menurutnya, prinsip-prinsip umum manajemen (general principle of management) seperti dikutip dari pendapat Henry Fayol dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pembagian kerja (Division of Work)

Pembagian kerja (division of work) merupakan upaya men spesialisasi pekerjaan kepada masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya, sehingga bisa lebih produktif dan menguntungkan. Pada intinya, pembagian kerja ini merupakan pembagian kerja secara objektif-rasional bukan secara subyektif-emosional, sehingga prinsip yang digunakan adalah the right man in the right place atau orang yang tepat di tempat yang tepat pula.

Prinsip the right man in the right place menjamin terwujudnya kestabilan, kelancaran atau efisiensi kerja. Dengan demikian, pembagian kerja dapat dipandang sebagai upaya bagaimana sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen bekerja secara maksimal sesuai kelebihan dan kekurangannya untuk mencapai tujuan yang ditargetkan.

2. Wewenang dan Tanggung jawab (Authority and Responsibility)

Prinsip ini menekankan pada pemberian wewenang kepada sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal. Wewenang yang diberikan juga harus diikuti pertanggung jawaban, sehingga terjadi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Wewenang yang kecil tentu diikuti tanggung jawab yang kecil pula, sebaliknya wewenang yang besar juga pasti diikuti oleh tanggungjawab yang besar pula.

Wewenang dan tanggung jawab merupakan dua hal yang menjadi satu kesatuan dalam menjalankan roda kerjasama mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Karena tanpa dua hal tersebut, tidak akan terjadi hubungan antara atasan dan bawahan dalam menjalankan rencana-rencana yang telah digariskan.

3. Disiplin (Discipline)

Prinsip disiplin ini erat kaitannya dengan wewenang. Dalam arti kata bahwa jika wewenang yang dimiliki seorang manajer tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan yang akan terjadi hilangnya prinsip kedisiplinan. Dengan demikian, pemegang wewenang (manajer) harus mampu menanamkan dalam dirinya prinsip kedisiplinan dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga hal tersebut juga akan memberikan keteladanan pada bawahannya (sumber daya manusia yang lain) untuk berlaku disiplin dalam melaksanakan pekerjaan guna tercapainya tujuan.

4. Kesatuan Perintah (Unity of Command)

Kesatuan perintah merupakan sebuah prinsip dimana perintah yang diterima bawahan sebagai anggota lingkaran suatu manajemen yang ada, tidak diperkenankan untuk diberikan oleh lebih dari satu orang manajer di atasnya. Prinsip ini harus benar-benar diperhatikan oleh bawahan agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan kepada

siapa harus mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut. Perintah yang diterima dari manajer lebih dari satu, dapat berakibat rusaknya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan perintah yang berbeda antara satu manajer dengan manajer lainnya, bahkan bisa jadi bertentangan.

5. Kesatuan Pengarahan (Unity of Direction)

Kesatuan pengarahan merupakan suatu prinsip manajemen yang berpandangan bahwa setiap komunitas pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama, harus dipimpin oleh seorang manajer saja. Kesatuan pengarahan (unity of direction) harus dibedakan dari kesatuan perintah (unity of command). Kesatuan pengarahan berhubungan erat dengan struktur organisasi, sedangkan kesatuan perintah berhubungan erat dengan jalannya fungsi personalia dalam suatu organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bawahan (anggota dalam lingkaran suatu manajemen) harus diarahkan pada target-sasarannya. Dengan demikian, kesatuan pengarahan (unity of direction) erat hubungannya dengan pembagian kerja serta sangat bergantung pada kesatuan perintah (unity of command).

6. Subordinasi Kepentingan Perseorangan terhadap Kepentingan Umum (Subordination of Individual Interest to General Interest)

Prinsip ini menekankan pada pengabdian kepentingan seseorang terhadap kepentingan umum (kepentingan organisasi) sebagai tujuan. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang tergabung dalam suatu lingkaran manajemen menyadari bahwa kepentingan pribadinya bergantung pada keberhasilan atau tidaknya kepentingan umum (organisasi). Sehingga dengan kesadaran tersebut, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing personal dalam suatu lingkaran manajemen akan berjalan lancar, karena melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan rasa senang dan nyaman.

7. Penggajian Pegawai (Remunerasi)

Sederhananya prinsip ini menegaskan bahwa manajemen juga harus memperhatikan besaran gaji/upah yang diberikan kepada anggota dalam lingkaran suatu manajemen. Pemberian gaji/upah harus berdasarkan pada keadilan dan harus memberikan kepuasan. Sehingga dengan gaji/upah yang memuaskan diharapkan nantinya dapat merangsang para anggota lingkaran suatu manajemen bekerja secara lebih maksimal dan lebih disiplin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8. Pemusatan (Centralization)

Pemusatan wewenang dalam manajemen akan melahirkan konsekuensi pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir berada pada orang yang diberi wewenang tertinggi atau disebut juga sebagai

manajer puncak. Prinsip dasarnya wewenang berjalan seiring dengan tanggung jawab, semakin tinggi wewenang seseorang maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang diembannya.

Kesimpulannya, pemusatan wewenang dalam manajemen dilakukan semata-mata menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan dalam menjalankan suatu kegiatan.

9. Hirarki/Rangkaian Perintah (Chain of Command)

Hirarki/rangkaian perintah mengharuskan perintah berjalan dari atas ke bawah dengan jarak yang terdekat. Artinya, perintah tidak diperkenankan melompati tingkatan struktur yang ada dalam suatu organisasi. Perintah dari manajer puncak dalam konteks ini sangat dihindari langsung ditujukan kepada manajer tingkat bawah, melainkan harus melalui manajer tingkat menengah. Sehingga menegaskan bahwa hirarki/rangkaian perintah dibutuhkan untuk kesatuan arah perintah yang kemudian membentuk suatu rantai perintah yang mengacu pada tingkatan struktur sebuah organisasi. Rantai perintah kemudian berjalan dari otoritas tertinggi sampai pada tingkat yang paling rendah.

10. Ketertiban (Order)

Prinsip ketertiban dalam melaksanakan suatu pekerjaan merupakan salah satu syarat pokok yang harus terpenuhi. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan dalam keadaan yang kacau atau asal-

asalan. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh elemen, baik atasan maupun bawahan dalam suatu lingkaran manajemen berpegang pada azas kedisiplinan yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

11. Keadilan dan Kejujuran (Equity)

Prinsip keadilan dan kejujuran dipandang sebagai suatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan elemen-elemen atau bawahan yang ada dalam lingkaran suatu manajemen terhadap atasannya. Kesetiaan dan ketaatan tersebut dapat terwujud dengan mengkoordinasikan keadilan dan kejujuran para manajer di dalam memimpin para bawahannya dan memicu tumbuhnya rasa tunduk kepada kekuasaan dari atasan. Karena pada dasarnya, bawahan senantiasa menuntut diperlakukan dengan wajar sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Prinsip keadilan dan kejujuran erat kaitannya dengan masalah moral orang-orang yang ada dalam lingkaran manajemen dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa dalam manajemen, atasan harus bisa memperlakukan bawahannya dengan sebaik-baiknya. Dengan perlakuan yang baik dari atasan, maka sangat besar kemungkinan akan lahir rasa ketaatan dan kesetiaan dari bawahan.

12. Stabilitas Masa jabatan dalam Kepegawaian (Stability of Tenure of Personnel)

Prinsip ini perlu dijalankan mengingat pentingnya sumber daya manusia yang memadai sangat menjadi penentu berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian merupakan upaya menghindari seringnya terjadi proses pergantian yang berakibat pada terganggunya pekerjaan yang sedang

13. Prakarsa (Initiative)

Prakarsa merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus ada dalam diri manajer/pimpinan pada khususnya sebagai penegas bahwa dirinya memang pantas menempati posisi tersebut. Prakarsa dimaknai sebagai tindakan pemunculan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang bernilai guna bagi penyelesaian pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya. Pada prakarsa terhimpun perasaan, kehendak, pikiran, keahlian, serta pengalaman seseorang yang pada saatnya nanti akan direalisasikan untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Dalam prakarsa terkandung stimulus bagaimana orang yang bersangkutan harus dihargai, karena pada hakikatnya manusia butuh penghargaan.

14. Semangat Kesatuan Korp (Esprit de Corp)

Setiap anggota dalam lingkaran suatu manajemen harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan sehingga melahirkan semangat

kerja sama yang baik. Rasa kesatuan dapat tumbuh apabila masing-masing anggota memiliki kesadaran bahwa dirinya membutuhkan anggota lainnya, demikian pula anggota lainnya sangat dibutuhkan dirinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



2.2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2.1 Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu:

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran;
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah;
3. Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah;
4. Kesejahteraan pegawai;
5. Administrasi;
6. Pembinaan teknis edukatif;
7. Pendataan Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan

Biaya satuan di jenjang sekolah ialah aggregate anggaran pendidikan jenjang sekolah, bagus yang berasal dari pemerintah, orang tua, serta masyarakat yang dikeluarkan untuk pengelolaan pembelajaran dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa ialah dimensi yang melukiskan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah dengan cara efisien untuk kebutuhan anak didik dalam menempuh pendidikan. (Sulasmi. 2021: 39)

Anggaran BOS Reguler merupakan Anggaran BOS yang dialokasikan untuk menunjang keinginan berbelanja operasional semua partisipan ajar pada dasar pendidikan dasar serta menengah. Guna menunjang pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah reguler dengan cara akuntabel serta tepat sasaran, sekolah harus mengikuti petunjuk teknis pengurusan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) reguler. Berdasarkan Permendikbud ristek RI Nomor 2 Tahun

2022 Bab 2 Pasal 7 tentang penerima Dana, sekolah yang hendak memperoleh Dana BOS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
2. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya
3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik
4. Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
6. Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Untuk satuan biaya Dana BOS bervariasi sesuai karakteristik dan kebutuhan antar daerah. Satuan biayanya berbeda antar daerah dan dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Adapun besaran anggaran penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Setiap tahunnya untuk siswa SD menerima jumlah uang sebesar Rp. 900.000. – Rp 1.960.000
2. Setiap tahunnya untuk siswa SMP menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.100.000 – Rp 2.480.000

3. Setiap tahunnya untuk siswa SMA menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 – Rp 3.470.000
4. Setiap tahunnya untuk siswa SMK menerima sejumlah uang sebesar RP. 1.600.000 – Rp 3.720.000
5. Sedang untuk siswa SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB setiap tahunnya menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000 – Rp 7.940.000

2.2.2 Prinsip Dana Bos

Menurut peraturan menteri pendidikan serta kebudayaan Republik Indonesia no 2 tahun 2022 Bab I Pasal 2 menerangkan bahwa Pengurusan Dana BOS Reguler dilakukan berlandaskan prinsip:

1. Fleksibel yaitu pengelolaan Dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
2. Efektif yaitu pengelolaan Dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
3. Efisien yaitu pengelolaan Dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
4. Akuntabel yaitu pengelolaan dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Transparan yaitu pengelolaan Dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

2.2.3 Komponen Dana Bos

Komponen penggunaan Dana BOS regular merujuk pada petunjuk teknis Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Bab V Pasal 26 menyatakan bahwa Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana anggaran dengan rincian antara lain :

(1) Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;

10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan;
dan/atau
12. Pembayaran honor.

(2) Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

(3) Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan: a. berstatus bukan aparatur sipil negara; b. tercatat pada Dapodik; c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

(4) Ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

2.3. Mutu Pendidikan

2.3.1. Definisi Mutu Pendidikan

Menurut Nur Azman (2013:227), mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu kadar. Juga bisa berarti derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam pengertiannya mutu mengandung makna derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible atau intangible. Mutu yang tangible artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku.

Menurut Sudrajad (2005:17) pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill). Lebih lanjut Sudrajad mengemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.

Dari uraian pendapat di atas jelas bahwa mutu pendidikan adalah suatu pilar untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Yang mana suatu masa depan bangsa itu terletak pada keberadaan kualitas pendidikan yang berada pada masa kini. Suatu pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat manajemen sekolah yang bagus. Mutu juga merupakan suatu ajang kompetisi yang sangat penting, karena itu merupakan suatu wahana untuk meningkatkan mutu produk layanan jasa. Dengan demikian, mewujudkan suatu pendidikan yang

bermutu adalah penting, sebagai upaya peningkatan masa depan bangsa sekaligus sebagian dari produk layanan jasa.

Dalam rangka umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan.

Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat sebagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam school based

quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai (Tuala, 2017:63)

2.3.2 Indikator Mutu Pendidikan

Indikator mutu pendidikan seperti yang diungkapkan Garvin yang dikutip oleh Nasution (2000:17-18), setidaknya ada delapan dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pendidikan, yaitu:

1. Kinerja (perform) yaitu berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli produk
2. Features, merupakan aspek kedua dari performa yang menambah fungsi dasar serta berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangan.
3. Keandalan (reliability) yaitu berkaitan dengan kemungkinan suatu produk yang berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu
4. Konformitas, (conformance) yaitu berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
5. Daya tahan (durability) yaitu berkaitan dengan berapa lama produk dapat terus digunakan.
6. Kemampuan pelayanan (serviceability) merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan

7. Estetika (aesthetics) karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari pilihan individual.
8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) yaitu karakteristik yang berkaitan dengan reputasi (brand name, image).

Pada aspek output (keluaran) maka peserta didik memiliki pengetahuan, kepribadian dan performansi. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya mementingkan proses dan mengesampingkan input dan outcome. Antara proses, input dan outcome menjadi satu kesatuan untuk mencapai kualitas dalam pendidikan. Aspek yang dominan dalam penentuan mutu adalah pada aspek proses. Sedangkan menurut Adams arti kualitas dalam konteks pendidikan. Dalam konteksnya kualitas pendidikan tampaknya dapat merujuk pada input (jumlah guru, jumlah pelatihan guru, jumlah buku teks), proses (jumlah waktu pembelajaran langsung sejauh mana pembelajaran aktif), output (tes skor, tingkat kelulusan), dan hasil (kinerja dalam pekerjaan berikutnya). Selain itu, kualitas pendidikan dapat diartikan sekadar mencapai target yang ditetapkan dan tujuan. Pandangan yang lebih komprehensif juga ditemukan, dan interpretasi kualitas mungkin didasarkan pada suatu lembaga atau reputasi program, sejauh mana sekolah telah mempengaruhi perubahan dalam pengetahuan siswa, sikap, nilai, dan perilaku, atau teori lengkap atau ideologi akuisisi dan aplikasi pembelajaran.

Ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa kualitas pendidikan didalamnya menyangkut pada input, proses dan output pendidikan. Bahkan tidak hanya pada sekedar mencapai target atau standar yang telah ditentukan namun pada reputasi lembaga dalam merespon perubahan

2.3.3 Faktor Utama Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh input dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Secara umum, Edward Sallis dalam bukunya *Total Quality Management in Education* menyebutkan, kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya rancangan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang kurang kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen), tidak cukupnya jam pelajaran, dan kurangnya sumberdaya. (Syafarudin 2012, 14)

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim (2007:56) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan empat faktor yang dominan, yaitu:

1. Kepemimpinan Kepala sekolah; Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan pelayanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.

2. Guru; Pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.
3. Siswa; Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.
4. Kurikulum; Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu pendidikan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Utamanya guru, karena guru sebagai ujung tombak di lapangan (di kelas) yang bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran.

2.3.4. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Teori manajemen mutu terpadu atau yang lebih dikenal dengan Total Quality Management (TQM) akhir-akhir ini banyak diadopsi dan digunakan oleh dunia pendidikan dan teori ini dianggap sangat tepat dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan saat ini. TQM didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan usaha yang berupaya memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan secara terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi.

Menurut Rochaety, dkk (2005: 97) Setidaknya ada sepuluh karakteristik TQM yang dianggap penting untuk meningkatkan dunia pendidikan, yaitu:

1. Fokus pada pelanggan (internal & eksternal),
2. Berorientasi pada kualitas,
3. Menggunakan pendekatan ilmiah,
4. Memiliki komitmen jangka panjang,
5. Kerja sama tim,
6. Menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan,
7. Mengadakan pendidikan dan pelatihan,
8. Menerapkan kebebasan yang terkendali,
9. Memiliki kesatuan tujuan,
10. Melibatkan dan memberdayakan karyawan

Di sisi lain, Zamroni memandang bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan model The Total Quality Management (TQM) di sekolah. Teori ini menjelaskan bahwa mutu pendidikan dengan model TQM ini mencakup tiga kemampuan, yaitu kemampuan akademik, sosial, dan moral (Zamroni, 2007: 6). Teori ini juga menyebutkan bahwa mutu sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di sekolah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara

sadar maupun tidak. Kultur ini diyakini mempengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, dan juga orang tua siswa. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga kearah peningkatan mutu sekolah, sebaliknya kultur yang tidak kondusif akan menghambat upaya menuju peningkatan mutu sekolah.

2.3.5. Implementasi Mutu Pendidikan

Anshory (2008:185) menyatakan bahwa Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut maka diselenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dengan pendidikan dan pengajaran itu diharapkan akan memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar sebagai bekal untuk dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, pendidikan nasional juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar sembilan tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olahraga agar

memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

Oleh karena itu demi mewujudkan semuanya dan demi tercapainya mutu atau kualitas pendidikan yang baik maka delapan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh kemendiknas dengan PP no 19 tahun 2005 sekarang diganti PP no 32 tahun 2013 yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan perlu diterapkan dan dilaksanakan secara hati-hati dan berdaya guna bagi mutu pendidikan secara merata.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Didalam buku Kumpulan Peraturan Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun penjelasan tentang 8 standar nasional pendidikan tersebut sebagai berikut:

1. Standar Isi

Standar isi meliputi lingkup materi serta tingkatan kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada tahapan serta jenis pembelajaran tertentu. Tiap tahapan mempunyai kompetensi yang berlainan, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Dalam standar isi terdapat kerangka dasar serta bentuk kurikulum, beban belajar, kurikulum jenjang dasar pendidikan, serta kalender pendidikan atau akademik yang bermanfaat buat prinsip pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Peraturan yang menerangkan mengenai standar isi untuk kurikulum KTSP merupakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 mengenai Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar serta Menengah. Sebaliknya untuk kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013.

2. Standar Proses

Standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan penerapan pembelajaran pada satu dasar pembelajaran guna meraih standar kompetensi lulusan. Cara pembelajaran semestinya dicoba dengan cara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Tiap dasar pendidikan melaksanakan perencanaan proses pembelajaran, penerapan proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran guna terlaksananya proses pembelajaran yang efisien serta berdaya guna. Ketentuan mengenai standar proses diatur dalam Permendikbud RI Nomor 65 tahun 2013.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan guna dasar pendidikan dasar serta menengah dipakai selaku prinsip evaluasi dalam memastikan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan itu mencakup standar kompetensi lulusan minimal dasar pembelajaran dasar serta menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, serta standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 memutuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) buat Satuan Pendidikan Dasar serta Menengah. proses pembelajaran guna terlaksananya proses pembelajaran yang efisien serta tepat guna. Sebaliknya untuk kurikulum 2013, ketentuan mengenai SKL ini diatur dalam Permendikbud RI Nomor 54 Tahun 2013.



4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah tenaga profesional yang bekerja merancang serta melakukan proses pembelajaran, memperhitungkan hasil angka pembelajaran, memberi pelajaran, dan melaksanakan riset serta dedikasi pada warga, terutama untuk pengajar pada perguruan tinggi. Sebaliknya tenaga kependidikan bekerja melakukan administrasi, pengurusan kompetensi selaku agen pembelajaran, sehat jasmani serta rohani, dan mempunyai keahlian untuk menciptakan tujuan pembelajaran nasional. Terdapat sebagian ketentuan yang wajib dipenuhi untuk para pengajar antara lain :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. Sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.

Pendidik wajib mempunyai kualifikasi akademik serta kompetensi selaku agen pembelajaran, sehat jasmani serta rohani, dan mempunyai keahlian untuk menciptakan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas merupakan tingkatan pendidikan minimal yang wajib dipenuhi oleh seseorang pengajar yang dibuktikan dengan sertifikat serta atau ataupun sertifikat keahlian yang relevan sesuai determinasi perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi selaku agen penataran pada tahapan pendidikan dasar serta menengah dan pembelajaran anak usia dini mencakup:

- a. Kompetensi pedagogik;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan standar minimal mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat main, tempat rekreasi serta berkreasi, dan sumber belajar lain, yang dibutuhkan buat mendukung proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi serta komunikasi.

Tiap lembaga pendidikan harus mempunyai sarana dan prasarana yang sudah ditentukan. Terdapat juga sarana tersebut antara lain mencakup peralatan, perlengkapan pembelajaran, media pembelajaran, buku serta pangkal berlatih yang lain, materi habis gunakan, dan perkakas lain yang dibutuhkan buat mendukung proses pembelajaran yang tertib serta berkepanjangan.

Sebaliknya prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pembelajaran, ruang pengajar, ruang aturan upaya, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi energi serta pelayanan, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, serta ruang atau tempat lain yang dibutuhkan buat mendukung proses pembelajaran yang tertib serta berkesinambungan. Ketentuan mengenai standar sarana prasarana ini dituangkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.

6. Standar Pengelolaan

Pengelolaan satuan pendidikan pada tahapan pembelajaran dasar serta menengah mempraktikkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan independensi, kemitraan, keikutsertaan, transparansi, serta akuntabilitas. Sedangkan pengurusan dasar pembelajaran pada tahapan pendidikan tinggi mempraktikkan independensi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan serta mendesak independensi dalam manajemen akademik, operasional, personalia, finansial, serta zona fungsional pengurusan yang lain yang diatur oleh tiap- tiap perguruan tinggi.

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, ialah standar pengelolaan oleh satuan pembelajaran, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah serta standar pengelolaan oleh Pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia yang berhubungan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 mengenai Standar Pengurusan Pembelajaran oleh Satuan Pendidikan Dasar serta Menengah.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan merupakan standar yang mengelola komponen serta besarnya biaya operasi satuan pembelajaran yang berlaku sepanjang satu tahun. Terdapat 3 jenis biaya dalam standar ini:

- a. Biaya investasi dasar pendidikan ialah biaya penyediaan sarana serta prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kegiatan tetap.
- b. Materi ataupun perlengkapan pendidikan habis pakai, dan
- c. Biaya operasi pendidikan tidak langsung semacam air, perawatan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, serta biaya individu. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana diartikan di atas mencakup biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Biaya perorangan begitu juga diartikan pada di atas mencakup biaya pendidikan yang wajib dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan cara teratur serta berkepanjangan.

Biaya operasi satuan pembelajaran begitu juga diartikan di atas mencakup:

- a. Honor pengajar serta daya kependidikan dan seluruh bantuan yang melekat pada gaji,

- b. Materi ataupun perlengkapan pembelajaran habis gunakan, dan
- c. Biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, pelayanan telekomunikasi, perawatan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, serta lain sebagainya. Ketentuan mengenai standar pembiayaan pembelajaran ini diatur dalam Permendiknas RI Nomor 69 Tahun 2009.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidik merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan mekanisme, prosedur, serta instrumen evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan dengan cara berkelanjutan untuk memantau proses, perkembangan, serta pemenuhan SNP merupakan Standar Kompetensi Pengajar serta Daya Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), serta Standar Pembiayaan. Bagian yang tercantum pada bagian proses merupakan Standar Isi, Standar Proses, serta Standar Evaluasi, sebaliknya bagian yang tercantum pada komponen output merupakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Penilaian pendidikan merupakan cara pengumpulan serta pengerjaan data untuk memastikan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan bersumber pada standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan mekanisme, prosedur, serta instrumen

penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat berupa ulangan dan atau ujian.

Prinsip penilaian terdiri atas: Sahih, objektif, adil, sistematis, terbuka, menyeluruh serta berkelanjutan, analitis, beracuan serta akuntabel. Evaluasi pembelajaran pada tahapan pembelajaran dasar serta menengah terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pengajar;
- b. Penilaian hasil belajar oleh dasar pendidikan; dan
- c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud RI Nomor 66 Tahun 2013.

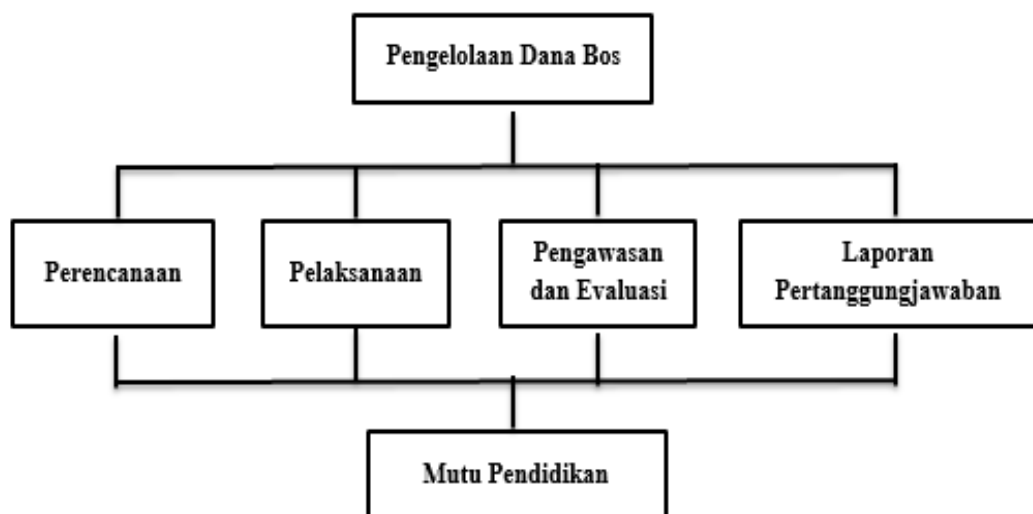
2.4. KERANGKA BERPIKIR

Dana BOS merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk mendukung dan memenuhi delapan standar nasional pendidikan atau disingkat SNP. SNP adalah standar atau kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia.

Terdapat 8 indikator Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian pendidikan. Seluruh 8 standar pendidikan tersebut berlaku bagi semua instansi pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga

pendidikan program kesetaraan seperti Kejar Paket A, B, dan C. Tujuan dibuatnya Standar Nasional Pendidikan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Standar ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung jawaban anggaran BOS agar berjalan dengan baik dan tepat guna dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Berikut skema kerangka berfikir pada penelitian ini.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir



2.5. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Idah Purwari (2020) dengan judul penelitian Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan studi kasus dilakukan di Sekolah Dasar Rayon IV(Empat) Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan pendidikan dan hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri 0711 Aliaga V Tahun Ajaran 2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, guru dan wali siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di SD Negeri 0711 Aliaga V Tahun Ajaran 2019 berasal dari BOS pusat/ Bos regular, BOS provinsi/ BOSDA, dan BOS kabupaten dengan jumlah Rp. 276.320.000,- yang mengalokasikannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantara Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar penilaian pendidikan begitu juga dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Penelitian oleh Ahmad Syahbuddin (2019) dengan judul Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan Dana Bantuan Operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa. Untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan Dana Bantuan Operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa. Untuk melihat perbedaan manajemen pengelolaan Dana Bantuan Operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara, guru dan siswa. Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan Dana Bantuan Operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Manajemen pengelolaan Dana Bantuan Operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Perbedaan manajemen pengelolaan Dana Bantuan Operasional untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa terletak pada skala prioritas. Di SD Negeri Paya Bujok Teungoh tidak ada skala prioritas dalam merencanakan anggaran, karena seluruh Dana BOS yang dialokasikan harus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan di SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa ada skala prioritas dalam merencanakan anggaran, yaitu untuk pembayaran honor guru dapat dibiayai oleh Dana BOS mencapai 50%.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk dasar bimbingan memperoleh informasi yang lengkap, cermat serta objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bukti dalam riset bisa dibuktikan dengan kebenaran yang berlangsung di lokasi riset. Penelitian merupakan aktivitas pengumpulan, pengerjaan, analisa, serta penyajian informasi yang dilakukan dengan cara analitis serta objektif guna memecahkan sesuatu permasalahan ataupun mencoba suatu hipotesis untuk meningkatkan prinsip- prinsip umum. (Hibrida, 2013: 40)

Menurut Sugiyono (2015:8) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian merupakan suatu strategi inkuiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan

secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2014:300).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memakai kerangka belakang alami, dengan arti menerangkan kejadian yang terjadi serta dilakukan dengan jalur mengaitkan bermacam tata cara yang terdapat dalam riset kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai untuk melukiskan bagaimana manajemen yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengorganisasian. (Moleong 2013:5)

Penelitian ini meneliti tentang pengelolaan laporan pertanggung jawaban program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Musda Perbaungan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan perhitungan angka melainkan penggambaran terhadap objek penelitian baik berbentuk kata kata tertulis maupun lisan berdasarkan fenomena yang terjadi dan ditemukan oleh peneliti ketika berada di lapangan.

Terdapat tiga unsur penting yang penulis pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah ditinjau dari faktor kemudahan baik dari segi teknis maupun non teknis dan juga mengacu pada pendapat Spradley dalam S. Nasution, yang mengemukakan bahwa apabila ingin mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik maka dalam memilih dan menentukan lokasi penelitian haruslah

mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut: (a) sederhana; (b) mudah memasukinya; (c) tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian; (d) mudah memperoleh izin; (e) kegiatan terjadi berulang ulang. (Nasution 2003:27)

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SMK Musda Perbaungan yang beralamat di jalan Pematang Siantar KM 39,9 Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan bantuan operasional sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan. Setelah mengajukan izin meneliti kepada pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah secara langsung dan ternyata ada respon positif pihak kepala sekolah, guru, beserta stakeholder untuk melaksanakan penelitian ini.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan di SMK Musda Perbaungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Tahun 2022												Tahun 2023																										
		Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember			Januari			Februari			Maret		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Penyusunan Proposal Tesis	█	█	█	█																																			
2	Bimbingan dan Perbaikan Proposal Tesis					█	█	█	█																															
3	Seminar Proposal Tesis									█	█																													
4	Perbaikan Proposal										█	█																												
5	Pengumpulan Data											█	█																											
6	Pengumpulan Data dan Analisa Data													█	█																									
7	Bimbingan Tesis																				█	█																		
8	Penyusunan Tesis																							█	█	█	█													
9	Seminar Hasil Tesis																																							
10	Perbaikan Hasil Tesis																																							
11	Sidang Meja Hijau																																							█

3.3. Sumber Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1. Data Primer

Menurut Sugiarto (2017:87) data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber. Data primer sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu: Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi; 1) Kepala Sekolah, 2) Komite Sekolah 3) Bendahara BOS, 4) Kepala Tata Usaha Sekolah, 5) Kepala langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian dilaksanakan.

3.3.2. Data Sekunder

Menurut Sugiarto (2017:87) data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto-foto, artikel, situs internet, serta literatur untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara lain dokumen, foto, artikel, situs internet, serta literatur yang ada di lokasi penelitian yakni di SMK Musda Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dikarenakan teknik-teknik tersebut dilakukan dengan jalan pengamatan terhadap kegiatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data seakurat mungkin.

3.4.1 Observasi

Menurut Arikunto (2012: 57) observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pendayagunaan Dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan sistematis terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi umum, lingkungan sekolah, kegiatan proses belajar mengajar, keadaan dan fasilitas pendidikan, kondisi belajar siswa, keadaan


manajemen-manajemen mulai dari kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, dan lain sebagainya.

Peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk melihat secara langsung obyek penelitian, peneliti mengamati dan mencatat atau mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman observasi langsung dan tidak langsung di lokasi penelitian tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan.

3.4.2 Wawancara

Arikunto (2012: 44) berpendapat bahwa wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya-jawab sepihak. Menurut Widoyoko (2016: 40) Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan responden atau orang yang diwawancarai (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara terbagi dalam tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara dengan pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini dilakukan bila pewawancara telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh dari narasumber. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis yang lebih terbuka dalam

mengungkapkan jawaban. Sedangkan wawancara tak berstruktur membebaskan pewawancara menanyakan apapun yang ingin ditanyakan, sehingga pewawancara dapat mengetahui informasi secara mendalam



(Sugiyono, 2011: 233-234). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Jenis wawancara ini memberikan kebebasan pada subjek penelitian yang seluas-luasnya dalam menjawab pertanyaan, memberikan pandangan, pendapat dan sikap tanpa dipengaruhi oleh pewawancara. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu: 1) Kepala Sekolah sebagai informan pertama, 2) Kepala Tata Usaha sebagai informan kedua, 3) Bendahara BOS sebagai informan ketiga, 4) Guru teknik pemesinan (TPM) sebagai informan keempat dan 5) Komite sebagai informan ke lima.



3.4.3 Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Menurut Margono (2010:181) dokumentasi adalah Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain. Data dokumentasi ini diperoleh dari pihak terkait untuk digunakan peneliti sebagai pelengkap dari hasil wawancara dan observasi. Metode dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat arsip-arsip yang ada dan dijadikan dokumentasi yaitu sebagai berikut : 1) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan Dana Operasional Sekolah, 2) Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), 3) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Operasional Sekolah, 4) Catatan sejarah sekolah, profil, visi dan misi, data guru, data pegawai serta data siswa berupa struktur organisasi dan lainnya. Dalam teknik penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti berupa kamera dan handphone sebagai alat.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482) teknis analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang dipakai dalam riset ini melalui sebagian tahapan sesuai dengan teknik analisis bentuk interaktif, terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahapannya sebagai berikut:

3.5.1. Tahapan Pengumpulan Data (Data collection) merupakan tahapan proses riset dimana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah dalam rangka mengumpulkan data sistematis untuk keperluan analisis.

3.5.2. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data berarti merangkum data-data yang diperoleh di lapangan selama melakukan penelitian. Data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan permasalahan akan dipilih, sementara yang tidak diperlukan akan dipisahkan. Proses ini berlanjut sampai proses pengumpulan data di lapangan berakhir, bahkan sampai pada saat pembuatan laporan sehingga tersusun secara lengkap.

3.5.3 Penyajian Data (Data Display)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Dan data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahap yang lain. Tetapi setelah data terakhir direduksi maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan

melihat penyajian data, maka dapat dipahami bahwa apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.



3.5.4 Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data terkumpul dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka yang kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar lebih kokoh seiring bertambahnya data sehingga menjadi suatu konfigurasi yang utuh dan kuat. Pada tahapan ini peneliti akan melakukan interpretasi data sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Interpretasi data akan menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Tahapan ini akan menghubungkan antara seluruh data, fakta dan informasi yang ditemukan dengan nalar peneliti.

3.6. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Moleong (2017:330) adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Menurut Sugiyono (2015, 276) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

3.6.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang valid dan absah.

3.6.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Informasi dari responden diuji kredibilitasnya melalui dua atau lebih teknik pengambilan data yang berbeda.

3.6.3 Triangulasi waktu.

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, apakah seiring waktu data dari responden berubah atau tetap, itulah sebabnya triangulasi waktu diperlukan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Moleong (2012: 178) keabsahan data melalui teknik triangulasi dapat diketahui melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa saja yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan pada perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersangkutan.

Dalam penelitian kualitatif ini, untuk memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Misalnya untuk menggali perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS. Peneliti melakukan triangulasi teknik dimana informasi yang didapat melalui hasil wawancara tentang perencanaan penggunaan Dana BOS dan diperiksa lagi kebenarannya dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen terkait yaitu RKAS. Peneliti membandingkan data dari beberapa teknik pengumpulan data untuk mengetahui keabsahan data. Jika dari beberapa sumber dan dari beberapa teknik yang digunakan hasilnya sama berarti data yang diperoleh adalah memperoleh keabsahan data. Kesimpulannya, teknik triangulasi memanfaatkan penggunaan teknik perbandingan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti lebih lanjut menyajikan data hasil dan pembahasan, peneliti akan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dilaksanakan di SMK Musda Perbaungan. Adapun hal yang akan dipaparkan terdiri dari 1) profil sekolah, 2) visi dan misi sekolah, 3) keadaan peserta didik tahun pelajaran 2022/2023, 4) Kompetensi keahlian, 5) keadaan tenaga pendidik dan kependidikan, 6) keadaan sarana dan prasarana, 7) struktur organisasi sekolah.

4.1.1 Profil Sekolah

Tabel 4.1 Profil Sekolah

1.	Nama Sekolah	: SMKS MUSDA PERBAUNGAN
2.	NPSN	: 10209402
3.	Nama Kepala Sekolah	: SULAIMAN, S.Kom
4.	Status Sekolah	: Swasta
5.	Alamat Sekolah	: Jl. Pematang Siantar Km. 39,9 : Kel. Tualang Kec. Perbaungan
	RT / RW	: 0 / 0
	Kode Pos	: 20986
	Kelurahan	: Tualang
	Kecamatan	: Perbaungan
	Kabupaten/Kota	: Serdang Bedagai
	Provinsi	: Sumatera Utara
	Negara	: Indonesia
6.	Posisi Geografis	: 3.5681 (Lintang) : 98.981 (Bujur)

Pelengkap		
7.	SK Pendirian Sekolah	: 13443/105/1980
8.	Tanggal SK Pendirian	: 1980-07-16
9.	Status Kepemilikan	: Yayasan
10.	SK Izin Operasional	: 42.15/156/DISPMPPTSP/6/XVII.3/I/2018
11.	Tgl. SK Izin Operasional	: 2018-01-25
12.	Kebutuhan Khusus Dilayani	:
13.	Nomor Rekening	: 301.02.04.019535-5
14.	Nama Bank	: Bank SUMUT
15.	Cabang KCP/Unit	: Perbaungan
16.	Rekening Atas Nama	: SMKS MUSDA PERBAUNGAN/DANA BOS
17.	MBS	: Ya
18.	Memungut Iuran	: Ya (Tahunan)
19.	Nominal/siswa	: 160.000,-
20.	Nama Wajib Pajak	: YAYASAN MUSDA PERBAUNGAN
21.	NPWP	: 018422311114000
Kontak Sekolah		
22.	Nomor Telepon	: 061-7990658
23.	Nomor Fax	: 0
24.	Email	: nangin_s@yahoo.co.id
25.	Website	: http://www.smkmusda.web.id
Data Periodik		
26.	Waktu Penyelenggaraan	: Double Shift / 6 hari
27.	Nersedia Menerima BOS	: Ya
28.	Sertifikasi ISO	: 9001:2008
29.	Sumber Listrik	: PLN
30.	Daya Listrik	: 51500
31.	Akses Internet	: Telkom Speedy
32.	Akses Internet Alternatif	: Telkom Flash

4.1.2 Sejarah SMK Musda Perbaungan

SMK Musda Perbaungan berdiri pada tahun 1979, dan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 1979/1980, pada mulanya hanya membuka satu program studi atau satu jurusan yaitu Mekanik Umum. Kemudian berkembang sehingga membuka jurusan yang baru yaitu Teknik Mekanik Otomotif. Sesuai dengan perkembangan yang ada maka terjadi perubahan program studi yaitu dari Mekanik Umum Menjadi Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri dan terakhir menjadi Teknik Pemesinan Sedangkan Teknik Mekanik Otomotif Berkembang menjadi Teknik Kendaraan Ringan. Dan Pada tahun ajaran 2007/2008 Dibuka Kembali Satu Kompetensi Keahlian yang baru yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Pada Tahun Ajaran 2012/2013 dibuka kembali satu kompetensi keahlian yang baru yaitu Teknik Sepeda Motor.

4.1.3 Visi dan Misi Sekolah

Visi dan misi sekolah diperlukan dalam keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan formal. Visi dan misi sekolah akan menjadi urat nadi dalam semua proses pembelajaran di sekolah, baik yang bersifat akademis maupun non akademis dan merupakan tahap awal bagi sekolah dalam membuat rencana pengembangan sekolah. Berikut adalah visi dan misi SMK Musda Perbaungan:

“Menjadikan Sekolah Unggulan Untuk Menghasilkan Tamatan/Lulusan Yang Terampil Berakhlak Mulia Dan Religius.”

Sedangkan misi dari SMK Musda Perbaungan adalah:

1. Meningkatkan Keterampilan Guru Melalui Diklat
2. Terjalannya Akad Kerjasama Dengan DU/DJ
3. Meningkatkan Kurikulum KBM dan Sistem Evaluasi.
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Kesejahteraan Guru/Pegawai.
5. Meningkatkan Profesional Unit Produksi Sekolah Dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa dan Guru.
6. Menjadikan Tamatan yang Siap Bekerja

4.1.4 Keadaan Peserta Didik

Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Didalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berikut ini data jumlah peserta didik SMK Musda Perbaungan.

Tabel. 4.2 Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jlh Lk + Pr	Jumlah Rombel
		Lk	Pr		
1.	Kelas X	349	118	467	13
2.	Kelas XI	403	154	557	15
3.	Kelas XII	310	181	491	14
Jumlah		1062	453	1515	42

4.1.5 Kompetensi Keahlian

SMK Musda Perbaungan memiliki lima pilihan jurusan (kompetensi keahlian) yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan bakat siswa.

Tabel. 4.3 Jumlah Kompetensi Keahlian

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1.	Teknik Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik komputer dan Jaringan
2.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
3.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak
5.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

4.1.6 Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Dalam organisasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Menurut UU No.20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 2 Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Sedangkan pengertian tenaga kependidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMK Musda Perbaungan secara keseluruhan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Pendidik

NO.	NAMA GURU	BIDANG STUDI
1	SULAIMAN S.Kom	Kepala Sekolah
2	ADITYA UTAMA, S.Kom	Produktif RPL
3	AKMAL HENDANU PUTRA, S.T	Produktif TKRO
4	ARDIANSYAH, S.T	Produktif TPM
5	ARFIN RAINALDI SIREGAR	Produktif TBSM
6	ATIKA PUTRI, S.Pd	BK
7	AZIZAH, S.Pd	Bahasa Indonesia

8	BELLA AGUSTIA SARI, S.Pd	Matematika
9	CHAIRUL EFENDI, S.Pd	Produkti TBSM
10	DARWIN BANGUN, S.Si, S.Pd	Fisika
11	DEDI GUNAWAN, S.Pd	Produktif TKJ
12	DEVI ULİYANA RANGKUTI, A.Md	Produktif TKJ
13	DIKI IRWANDA, S.Pd	PKK
14	DORMIAN SINAGA, S.Pd	PKN
15	Drs. SULAIMAN MS	Bahasa Indonesia
16	Drs. SURIADI	Produktif TPM
17	ELIDA MARIA SIAGIAN	PAK Kristen
18	FIRMAN SIPAYUNG	Matematika
19	ISWANTO, S.Pd,	Produktif TPM
20	KIKI NURMANSYAH, S.Pd I	PAK Islam
21	M. AGUS SALIM SIREGAR, S.Kom	Produktif RPL
22	M. MAULANA PUTRA, S.T	Produktif TKRO
23	M. RAMLI, S.Ag	PAK Islam
24	MACHLISA TAHURI, S.Kom	Produktif TKJ
25	MHD. FAUZAN SYAUFI S.LUBIS, S.Pd	Kimia
26	M. SULAIMAN ZEGA, A.Md	Produktif TBSM
27	MUKHLIS SARAGIH, S.Ag	PAK Islam
28	MUZLIANI LIMBONG, S.Pd	Matematika
29	NADIA SYAHFITRA, S.Pd	Matematika
30	NANDA SYAHPUTRA, S.Pd	Bahasa Indonesia
31	NIRWANDA DESMILA PUTRI, S.Kom	Produktif TKJ
32	NUR EFENDI, ST	Produktif TKRO
33	NUR FADILLAH, S.Pd	BK
34	NURASIAH SIMBOLON, S.Pd	Bahasa Inggris
35	NURMAULIDA DESLIANA, SE	Sejarah

NO.	NAMA GURU	BIDANG STUDI
36	NURUL HUDA, S.Pd	Sejarah
37	NURUL MAULIDHA, S.Kom	Produktif RPL
38	OKTO VERIZANA PURBA, S.Pd	Penjaskes
39	PARJIMAN, ST	Produktif TBSM
40	POER ALMIRA.S.Pd	BK
41	PURWANTO, ST	Produktif TKRO
42	PUTRA I. HANIF SITORUS, S.Pd.I	PAK Islam
43	RAFIKA PUTRI, S.Pd	Produktif TPM
44	RAJALI LIMBONG,SE.,S.Kom	Produktif TKJ
45	RAMDHAN SAGITA, S.Pd	PKN
46	RAMLAH SINAGA, S.Pd, S.Kom	Simulasi Digital
47	RATNA KUMALA DEWI, S.Pd	Bahasa Inggris
48	RIRIN HARDIANTI, S.Pd	Seni Budaya
49	RISTA SARI SINAGA, S.Pd	Bahasa Indonesia
50	RISTA, S.Kom	Produktif TKJ
51	RUSDI, S.Kom	Produktif TKJ
52	SABENA RAHMAH SARI, S.Pd	Kimia
53	SAMIDI, ST	Produktif TBSM
54	SANDRA SUGIARTO,S.Kom	Produktif TKJ
55	SUDARMONO.S.Pd	Fisika
56	SUGENG SYAHPUTRA, ST	Produktif TPM
57	RINALDI MAULANA, S.Kom	Produktif TKJ
58	SUPRIADI, SE, S.Pd.I	PKK
59	SURIONO, S.Pd	Produktif TKRO
60	SUWANDI TAMBA, ST	Produktif TKRO
61	SYABARIAH, S.Pd	Bahasa Inggris
62	TAUFIK HIDAYAT BANCIN, S.Pd	Bahasa Inggris
63	TENGGU M. IKHSAN RAHARDI,S.Pd	Penjaskes
64	UMI RAHAYU AFRIZA BARUS, S.Pd	Seni Budaya
65	WINANDA NASUTION,S.Pd	Bahasa Indonesia

66	YUNDA AULIA, S.Pd	Bahasa Inggris
67	YUSDIANA, S.Pd	PKK
68	ZUBAIDAH, SE	PKK

Tabel 4.5 Data Tenaga Kependidikan

No	Nama	L/P	Status Pendidikan	Jabatan
1	Dicki irwanda S.Pd	P	S1	Kepala Tata Usaha
2	Asmarani	P	SMA	Tata Usaha
3	Widya Hasta Sari	P	SMA	Pustakawan
4	Sugiono	L	SMA	Petugas Kebersihan
5	Aisyah Pratiwi Lubis	P	SMA	Tata Usaha
6	Zainuddin	L	SMA	Operator Dapodik
7	Mangun	L	SD	Penjaga Malam
8	Husni	L	SMP	Satpam
9	Mintar	L	SD	Penjaga Malam

4.1.7 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dapat dilihat dari dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan administrasi, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang bimbingan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik konseling, ruang praktek dengan peralatan yang sudah memenuhi

kriteria dunia usaha dan dunia industri dengan semua kondisi yang cukup baik dan dapat mendukung terlaksananya kegiatan belajar dan mengajar.

a) Sumber Belajar

Tabel 4.6 Sumber belajar

No	Jenis Sumber Belajar	Kuantitas			Kondisi	
		Cukup	Kurang	Tidak Ada	Baik	Kurang
	Buku Perpustakaan a. Fiksi b. Non Fiksi c. Referensi	✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓	
	Alat Peraga/Alat Bantu Pembelajaran a. Produktif b. Adaptif c. Normatif	✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓	
	Alat Praktik a. Produktif b. Kesenian c. Pendidikan Jasmani	✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓	
	Media Pendidikan a. Audio Player / Radio b. Video Player / TV c. Slide Projector d. Komputer Untuk Pembelajaran e. LCD f. Papan Display / Majalah Dinding	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

Software					
a. Video Pembelajaran	✓			✓	

b) Sarana/Ruang Penunjang

Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana	Ada, Kondisi		Tidak Ada
		Baik	Kurang Baik	
1.	Ruang Kepala Sekolah		?	?
2.	Ruang Wakil Kepala Sekolah		?	?
3.	Ruang Guru		?	?
4.	Ruang Tata Usaha		?	?
5.	Ruang Bimb. Konseling		?	?
6.	Ruang OSIS		?	?
7.	Ruang Yayasan		?	?
8.	Ruang Aula/Serbaguna		?	?
9.	Ruang Kesehatan/UKS		?	?
10.	Ruang Ibadah/Mushola		?	?
11.	Ruang Keamanan/Satpam		?	?
12.	Lapangan Upacara		?	?
13.	Ruang Tamu		?	?
14.	Ruang Koperasi		?	?
15.	Kantin	?	?	
16.	Toilet/WC, Jumlah 12 Ruang		?	?

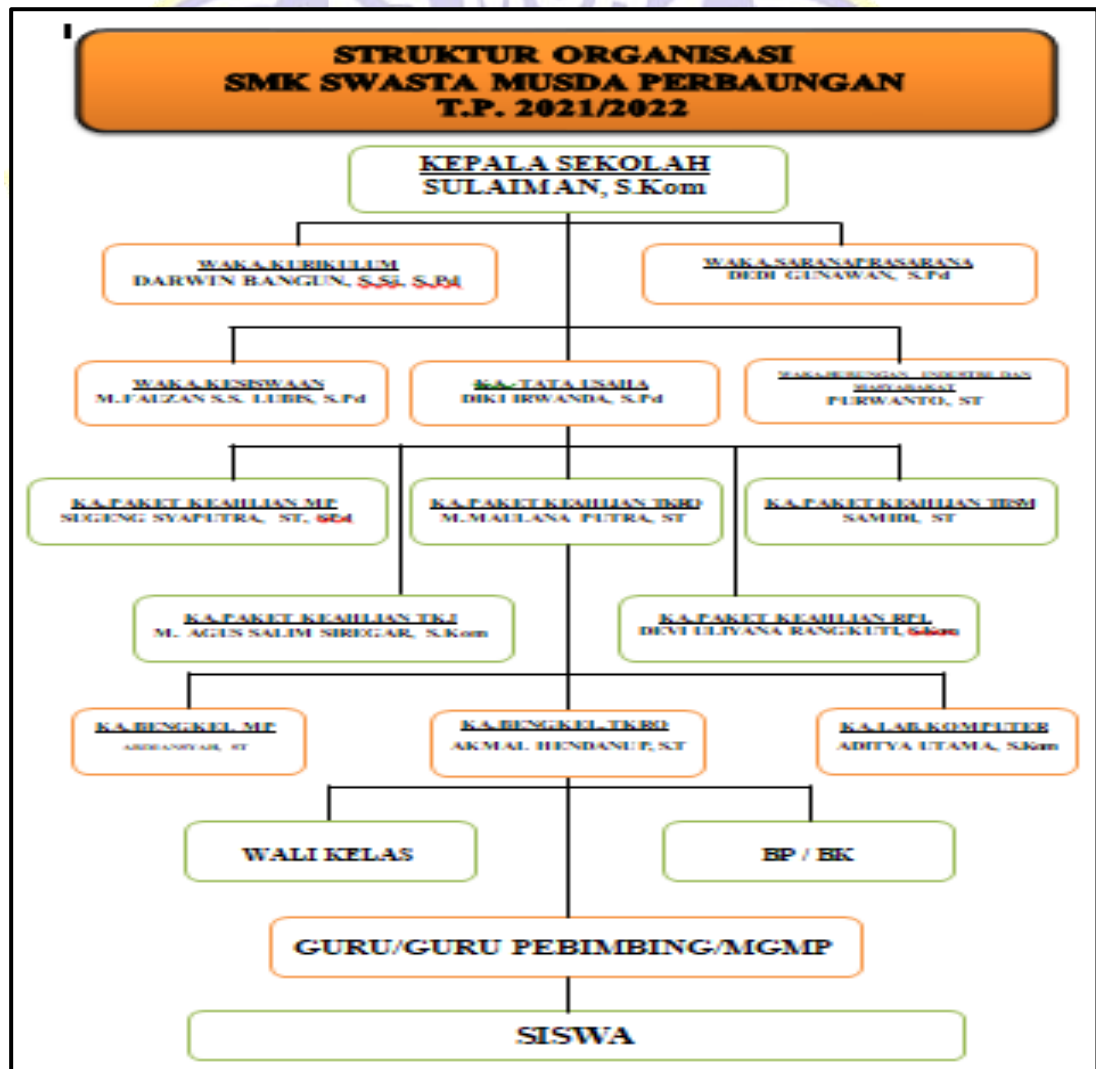
c) Prasarana

No.	Jenis	Keberadaan		Fungsi	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik
1.	Instalasi Air		?	?	?

2.	Jaringan Listrik		?	?	?
3.	Jaringan Telepon		?	?	?
4.	Internet		?	?	?
5.	Akses Jalan		?	?	?

4.1.8 Struktur Organisasi

Tabel 4.8 Struktur organisasi Smk Musda



4.1.9. Penerimaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah reguler bab 3 Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN. Dari tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah siswa SMK Musda sebanyak 1515 masing-masing siswa memperoleh bantuan sebesar Rp. 1,600,000 maka jumlah Dana BOS yang diterima sebesar Rp. 2,424,000,000 sesuai data Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Musda Perbaungan tahun 2022, Adapun rincian pemakaiannya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Standar Isi Rp. 22,846,000
2. Pengembangan Standar Proses Rp. 581,439,758
3. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Rp. 73,250,000
4. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Rp. 458,489,644
5. Pengembangan standar pengelolaan Rp. 139.742,000
6. Pengembangan standar pembiayaan Rp.1, 083,905,596
7. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian Rp. 64,327,002

Dari rincian RKAS diatas dapat disimpulkan bahwa poin utama penggunaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan adalah pengembangan standar pembiayaan.

4.2. Temuan Hasil Penelitian

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat pada alinea ke-4 UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa sangat ditopang dengan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, agar menjadikan SDM Indonesia berkualitas, diperlukan pemupukan sejak dini melalui peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan. Salah satu upaya pendidikan di satuan pendidikan adalah tindakan yang diambil Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan Dana oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan APBN yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan operasional sekolah, dibutuhkan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola penggunaan anggaran dengan baik dan bijak yang ditinjau dari aspek manajemen yang meliputi 1) perencanaan, 2) pelaksanaan dalam pemanfaatan anggaran, 3) pengawasan dan evaluasi, 4) laporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan yang berdampak pada 1) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 2) Peningkatan sarana prasarana sekolah, 3) Peningkatan hasil belajar/prestasi peserta didik.

Dari uraian diatas, Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana BOS dalam meningkat mutu pendidikan, berikut ini pemaparan uraian hasil penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan”.

4.2.1 Perencanaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan

Perencanaan merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen. Dalam setiap komunitas (organisasi), dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan (Planning) mencakup kegiatan memilih visi (misi), tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, bahwa berbagai aktivitas yang mendasarkan pada planning yang matang atas seluruh input dan proses yang ada, merupakan titik awal untuk menghasilkan output yang optimal. Sebaliknya, output yang dihasilkan tidak akan optimal bahkan tidak akan menghasilkan suatu output yang diharapkan apabila aktivitas yang dilakukan tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang. (Rohman, 2017:23)

Dari argumentasi tersebut, planning dipandang sebagai suatu proses pengupayaan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya alam yang ada, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan bahwa perencanaan (planning) merupakan fungsi

paling mendasar dan paling awal yang harus dilalui untuk melakukan berbagai kegiatan mencapai sebuah tujuan.

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran dibuat oleh pihak sekolah, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa informan, yaitu Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Bendahara, Guru dan komite sekolah. Masing-masing informan menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk saling melengkapi dan menyempurnakan data dan temuan penelitian.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Musda Perbaungan yakni Bapak Sulaiman, S.Kom pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 09.00 WIB, terkait dengan perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah beliau menyatakan bahwa :

“Dalam penyusunan RKAS, pertama kita buat adalah sebuah pertemuan dari beberapa bidang baik itu mulai dari kurikulum, kesiswaan, sarpras dan ketua-ketua jurusan, kemudian kita juga melibatkan guru, perwakilan tendik, perwakilan orang tua, komite sekolah ini, nah setelah itu kami menerima masukan dari masing-masing bidang apa saja yang ingin diprogramkan untuk tahun depannya sehingga dengan masukan-masukan tersebut kita sama-sama susun mana-mana saja yang bisa dicover oleh pembiayaan di Dana BOS tersebut.” (Kepala Sekolah, 24/09/2022)

Kepala sekolah juga menerangkan bahwa dalam penyusunan RKAS dibuat berdasarkan Raport mutu yang berfungsi sebagai penjaminan mutu internal di mana indikatornya mengukur delapan capaian standar nasional. Dari raport mutu itu kira-kira apa yang menjadi nilai ataupun poin yang masih merah akan menjadi skala prioritas bagi sekolah. Mengenai keterlibatan guru, memang tidak semua

guru dilibatkan secara langsung namun tetap diberikan kesempatan kepada guru itu untuk mengajukannya dengan Waka Kurikulum yang hasilnya akan disampaikan pada saat rapat RKAS.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan warga sekolah seperti wakil kepala, kepala jurusan, bendahara, kepala tata usaha sekolah, komite sekolah, perwakilan salah satu orang tua dan perwakilan guru. Perencanaan dibuat berdasarkan usulan dan pemetaan kebutuhan yang dapat dilihat berdasarkan raport mutu pendidikan, serta berdasarkan skala prioritas bagi sekolah.

Hal senada juga dikemukakan oleh bendahara sekolah Bapak Darwin Bangun, S, Si, S. Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 10.00 WIB, ia mengatakan bahwa:

“Proses pertama dibentuk tim manajemen bos tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab, bendahara, komite sekolah, kepala program keahlian, perwakilan guru, perwakilan orang tua, serta perwakilan tendik. Kemudian masing masing bidang diberikan buku permintaan belanja selama 1 tahun dan masing masing bidang membuat anggaran belanja tersebut, Hal ini dilakukan agar dapat menggali secara detail apa saja yang memang dibutuhkan oleh sekolah, guru, dan siswa dengan melihat skala prioritas kebutuhan sekolah kemudian dituangkan ke dalam aplikasi RKAS.” (Bendahara Sekolah, 24/09/2022)

Bendahara juga menjelaskan bahwa perencanaan anggaran berdasarkan hasil rapor mutu pendidikan dan penggunaan Dana BOS didasarkan dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Permendikbud sehingga apa saja item-item

yang dapat dibiayai atau dibelanjakan oleh Dana BOS agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai petunjuk teknisnya.

Hasil pemaparan bendahara di atas dapat dipahami bahwa penyusunan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, diundang komite sekolah, kepala tata usaha, berapa orang guru. Kemudian dapat digali berdasarkan usulan-usulan peserta rapat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan agar dalam perencanaan tidak menyalahi petunjuk teknis yang ada serta tepat sasaran.

Dipertegas lagi oleh komite sekolah Bapak Suryanto, SE, pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 13.00 WIB, tentang keterlibatannya dalam proses penyusunan rencana kegiatan anggaran BOS, beliau mengungkapkan:

“Ya, saya diundang waktu menyusun anggaran BOS pas awal tahun buk. Di Dalam rapat ada kepala program keahlian dan perwakilan guru yang menyampaikan kepada kepala sekolah dan bendahara apa saja yang diperlukan oleh masing-masing jurusan. Penjelasan itu untuk menentukan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas anggaran sekolah. Proses penyusunan dan perencanaan anggaran secara transparan dan sesuai petunjuk teknis yang ada dengan mengedepankan skala prioritas yang mana sangat urgent dan mana yang masih bisa ditahan dalam penggunaan anggaran biayanya.” (Komite Sekolah, 24/09/2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah dilibatkan dalam perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah. Proses penyusunannya dilaksanakan secara transparan, sesuai petunjuk teknis serta mendahulukan prioritas kebutuhan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMK MUSDA Perbaungan yaitu Bapak Diki Irwanda, S.Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 11.00 WIB, ia mengatakan bahwa:

“Saya sebagai perwakilan tenaga kependidikan dan warga sekolah lainnya baik itu bendahara, kepala jurusan, perwakilan guru, wakil kepala sekolah, perwakilan orang tua murid dan juga komite sekolah diikutsertakan dalam rapat perencanaan kegiatan anggaran BOS. Dalam rapat kami bisa memberikan usulan-usulan serta mempertimbangkan kebutuhan masing-masing jurusan baru kemudian tim BOS memetakan mana yang menjadi prioritas utama” (Kepala Tata Usaha, 24/09/2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan kepala tata usaha sekolah maka disimpulkan bahwa kepala tata usaha berfungsi sebagai penimbang berbagai masukan sekolah dilibatkan dalam perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah. Proses penyusunannya dilaksanakan secara transparan, melakukan pemetaan kebutuhan, sesuai petunjuk teknis.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Jurusan Teknik Pemesinan (TPM) yaitu Bapak Sugeng Syahputra, S.T pada hari Senin 26 september 2022 pukul 08.00 WIB terkait dengan perencanaan anggaran Dana BOS SMK Musda Perbaungan beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam rapat perencanaan penyusunan RKAS saya sebagai kepala jurusan teknik pemesinan dilibatkan dalam rapat pengelolaan bos. Disamping itu, kepala sekolah juga melibatkan semua kepala program keahlian, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sarpras dan kesiswaan, kepala tata usaha dan juga komite artinya semua perwakilan warga sekolah diikutsertakan dalam penyusunan anggaran. Dalam rapat tersebut, kemudian masing-masing bidang diberikan buku permintaan perbelanjaan selama satu tahun kedepan dan membuat anggaran belanja tersebut untuk diserahkan kepada bendahara (Kepala Jurusan Teknik Pemesinan, 26/09/2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rencana Kegiatan anggaran Sekolah (RKAS) yaitu dengan membentuk Tim manajemen BOS tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab, bendahara, komite sekolah, kepala program keahlian, perwakilan guru serta kepala tata usaha. Penyusunan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan visi dan misi sekolah. Dengan cara pendekatan secara internal ke bawahan, menggali sebanyak mungkin informasi kebutuhan yang diperlukan sekolah. Dengan cara ini kepala sekolah dapat menyerap seluruh masukan dan keluhan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Salah satu usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk perencanaan anggaran yaitu melakukan pemetaan kebutuhan, merangkum informasi kebutuhan, merancang skala prioritas terhadap kebutuhan. Seluruh guru yang hadir dapat mengusulkan ide dan masukan terhadap rencana penggunaan anggaran Dana.

Tim Manajemen Sekolah membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk satuan pendidikan swasta ditambah Ketua Yayasan. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun anggaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada tiap triwulannya. Oleh karena itu satuan pendidikan dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap triwulan

4.2.2 Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan.

Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) sangatlah penting untuk penggerak roda belajar mengajar didalam sebuah lembaga pendidikan. Penggunaan atau pemanfaatan Dana BOS diarahkan sesuai petunjuk teknis yang ada agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran. Kepala sekolah sebagai manajer dapat mengarahkan perencanaan anggaran yang telah dirumuskan bersama dapat memantau dan mengawasi secara langsung agar lebih tepat guna. Pemanfaatan penggunaan Dana BOS dipandang penting sebab kemajuan atau kemunduran dari sebuah lembaga sekolah dan juga tenaga kependidikan dapat dipantau melalui seberapa besar terhadap penyerapan dan pemanfaatan Dana apa saja yang dapat membantu terhadap guru-guru dalam mengasah ilmu pengetahuan maupun keterampilan mereka serta jalannya program-program sekolah. Kepala sekolah sebagai motivator dan pendorong gerak laju perkembangan keahlian mereka untuk lebih profesional dalam mengemban tugas mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yakni Bapak Sulaiman, S, Kom pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 09.00 WIB yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan:

“Pemanfaatan Dana BOS sudah berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS yang pelaksanaannya sudah sesuai perencanaan anggaran sesuai dengan skala prioritas kebutuhan sekolah dan memenuhi standar nasional pendidikan yang tertuang dalam RKAS yang

seluruh komponen penggunaannya sesuai dengan juknis yang berlaku.”
(Kepala Sekolah, 24/09/2022)

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Komite Sekolah yaitu Bapak Suryanto, SE, pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 13.00 WIB berkaitan dengan pemanfaatan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menerangkan:

“Kepala sekolah melakukan prioritas terhadap peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan kebutuhan penunjang proses pembelajaran” (Komite Sekolah, 24/09/2022).

Setelah itu peneliti melanjutkan kegiatan wawancara dengan Bendahara Sekolah yaitu Bapak Darwin Bangun, S, Si, S. Pd pada hari 24 September 2022 pukul 10.00 WIB terkait dengan pemanfaatan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menjabarkan:

“Penggunaan Dana BOS sesuai dengan skala prioritas yang tercantum dalam anggaran RKAS. Pemanfaatan anggaran Dana BOS didasarkan pada proposal rencana awal yang telah dibuat yaitu dengan mem prioritaskan peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kompetensi guru agar berimbas pada hasil belajar siswa” (Bendahara Sekolah, 24/09/2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMK MUSDA Perbaungan yaitu Bapak Diki Irwanda, S. Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 11.00 WIB terkait dengan pemanfaatan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menjelaskan sebagai berikut

“Pemanfaatan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah tentang apa saja yang telah dibelanjakan oleh sekolah dan kebermanfaatannya bagi sekolah, guru, dan siswa. Pengelolaan Dana BOS saya lihat tepat guna sesuai dengan kebutuhan prioritas yaitu peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kompetensi guru yang memang sangat penting dan dapat

langsung digunakan oleh sekolah dan guru-guru.” (Kepala Tata Usaha, 24/09/2022)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Jurusan Teknik Pemesinan (TPM) Kepala Jurusan Teknik Pemesinan (TPM) yaitu Bapak Sugeng Syahputra, S.T pada hari Senin 26 September 2022 pukul 08.00 WIB terkait dengan pemanfaatan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagai ketua jurusan teknik pemesinan dan guru produktif saya sangat merasakan manfaat dari Dana Bos ini. Saya pernah pelatihan assessor penggunaan Dana BOS pada waktu itu dimana assessor itu untuk meningkatkan kompetensi kami, karena assessor itu bisa dikatakan penguji, kebetulan kami punya LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Setelah dapat sertifikat assessor maka kami berhak mewakili pusat untuk menguji anak-anak dan saya ditunjuk sebagai manajer sertifikasi dan itu dibantu penDanaannya dari Dana BOS. Pelatihan-pelatihan ini juga salah satu visi misi sekolah kan meningkatkan kompetensi guru. Dan itu berdampak kepada peningkatan kompetensi siswa. Kalau untuk penyaluran alat-alat sudah terpenuhi. Karena untuk membeli alat-alat itu kan sebagian dari Dana BOS. Maka kami teknik pemesinan mengambil jargon teknik permesinan yang berkualitas.” (Kepala Jurusan Teknik Pemesinan, 26/09/2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa guru-guru dilibatkan dalam kegiatan workshop dan pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi para guru sesuai dengan visi dan misi sekolah. Penyediaan peralatan telah dipenuhi sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan guru-guru dan juga siswa.

Melalui beberapa paparan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan kebutuhan sekolah sudah terlaksana dengan baik. Sekolah memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, kebutuhan guru

sebagai penunjang kelancaran proses belajar mengajar, pelaksanaan workshop peningkatan kompetensi guru. Terpenuhinya komponen yang sesuai dalam rapat membuktikan pemanfaatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah diserap dengan baik dalam perencanaan seluruh program yang ada baik itu program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang haruslah kebermanfaatannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari visi misi sekolah. Pemanfaatan Dana yang sesuai dengan keperluan yang ada dapat mempercepat dalam proses mencapai keberhasilan suatu lembaga. Seluruh elemen sekolah harus dapat merasakan kebermanfaatannya pengelolaan Dana anggaran terutama siswa, karena merekalah ujung tombak pilar maju atau mundurnya suatu lembaga pendidikan. Pemanfaatan pengelolaan Dana BOS haruslah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diarahkan oleh pemerintah agar tidak menyimpang dalam hal penggunaannya.

4.2.3 Pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan.

Setiap program yang telah direncanakan dan dijalankan haruslah dibarengi dengan proses monitoring (pengawasan) agar pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disediakan oleh pemerintah. Pengawasan dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yakni diantaranya adalah guru-guru, dan warga sekolah. Adapun pengawasan dari pihak eksternal dapat berasal dari komite sekolah, dinas pendidikan, inspektorat, dan lembaga lainnya. Proses pengawasan dapat direncanakan atau dijadwalkan sesuai dengan aturan

atau ter periodik, sehingga pihak sekolah dapat secara maksimal mempersiapkan pelaksanaan dan pelaporan.

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen pendidikan. Pengawasan tidak hanya memeriksa apakah aktivitas berjalan sesuai rencana, serta memanfaatkan pengetahuan untuk mengadakan perbaikan demi pencapaian tujuan

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu Bapak Sulaiman, S, Kom pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 09.00 WIB yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan:

“Yang mengawasi penggunaan anggaran Bos dari pihak internal sekolah ada komite dan Yayasan selain itu juga tim manajemen bos juga turut mengawasi penggunaan anggaran. Pihak eksternal yaitu dinas Pendidikan dan inspektorat. Biasanya 1 bulan sekali saya akan menghadiri rapat MKKS yang juga dihadiri oleh pihak cabang dinas Pendidikan yang melakukan pembinaan-pembinaan terkait penggunaan Dana BOS, kemudian setiap 3 bulan sekali juga dinas pihak cabang dinas Pendidikan selaku pihak eksternal itu melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah penggunaan satu tahun terealisasi maka tim inspektorat akan memeriksa RKAS beserta bukti penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis”. (Kepala Sekolah, 24/09/2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pihak inspektorat dan dinas pendidikan secara terjadwal Temuan

dilapangan akan diberitahukan kepada pihak sekolah untuk dapat diperbaiki dan dilaporkan kembali agar sesuai dengan petunjuk yang ada.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Komite Sekolah yaitu Bapak Suryanto, SE, pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 13.00 WIB berkaitan dengan pengawasan penggunaan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menerangkan:

“Komite sekolah selalu melakukan pengawasan meski tidak secara langsung dan terjadwal seperti cabang dinas pendidikan atau pihak lainnya. Bentuk pengawasan mengikuti perkembangan sekolah dari kegiatan belajar mengajar serta pemenuhan dalam pembelanjaan modal kebutuhan sekolah.”
(Komite Sekolah, (24/09/2022))

Setelah itu peneliti melanjutkan kegiatan wawancara dengan Bendahara yaitu Bapak Darwin Bangun, S, Si, S. Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 10.00 WIB terkait pengawasan penggunaan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menjabarkan:

“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal yaitu yayasan dan komite dari pihak eksternal ada dinas Pendidikan dan ispektorat. Komponen yang dipantau saat dilakukan pengawasan yaitu RKAS BOS, dokumen LPJ yang didalamnya terdapat berbagai macam pembukuan dan bukti penggunaan anggaran.” (Bendahara Sekolah, 24/09/2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Tata Usaha yaitu Bapak Diki Irwanda, S.Pd pada hari Kamis 24 September 2022 pukul 11.00 WIB terkait dengan pengawasan penggunaan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pengawasan dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu inspektorat dan dinas pendidikan serta pihak internal yaitu yayasan dan komite sekolah.”(Kepala Tata Usaha, 24/09/2022)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Jurusan Teknik Pemesinan (TPM) yaitu Bapak Sugeng Syahputra, S.T pada hari Senin 26 September 2022 pukul 08.00 WIB terkait dengan pengawasan penggunaan Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam manajemen pengelolaan anggaran sekolah memiliki pengawasan baik itu dari pihak sekolah yaitu komite dan pihak yayasan maupun pihak luar sekolah seperti dinas Pendidikan dan inspektorat” (Kepala Jurusan Teknik Pemesinan, 26/09/2022)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa hadirnya dinas pendidikan provinsi, inspektorat, komite sekolah juga ambil bagian untuk mengawasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Diantara pihak yang termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam penggunaan Dana BOS adalah pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal sekolah termasuk didalamnya adalah kepala sekolah, komite sekolah dan tim manajemen BOS. Adapun pihak eksternal yang melakukan pengawasan adalah dari dinas pendidikan dan inspektorat. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar penggunaan Dana BOS tepat guna dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Pemerintah hadir dalam pengawasan sebagai bentuk tanggungjawab untuk meninjau keberlangsungan dan keterserapan untuk kegiatan dan pemanfaatan Dana Bos.

4.2.4 Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan.

Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah. Laporan pertanggungjawaban adalah suatu proses yang mesti dipenuhi oleh suatu bentuk organisasi pendidikan untuk menjamin dan melaporkan atas penggunaan seluruh Dana yang telah diberikan oleh pihak pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan) diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatan. Secara umum, laporan pelaksanaan program mencakup statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan Dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Berdasarkan dengan itu hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu Bapak Sulaiman, S, Kom pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 09.00 WIB yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan:

“Laporan pertanggung jawaban Dana sesuai dengan Lampiran bukti-bukti pengeluaran Dana, Laporan singkat setiap kegiatan. Bukti pengeluaran Dana, dokumentasi, seluruh arsip laporan keuangan BOS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu tunai, buku pembantu bank, Buku pembantu Pajak semua berdasarkan juknis”. (Kepala Sekolah, 24/09/2022)

Setelah itu peneliti melanjutkan kegiatan wawancara dengan Komite Sekolah yaitu Bapak Suryanto, SE, pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 13.00 WIB terkait dengan laporan pertanggungjawaban Dana bantuan operasional sekolah SMK Perbaungan beliau mengatakan:

“Sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran BOS dengan prosedur pertanggungjawabannya mengacu pada ketentuan petunjuk teknis yang berlaku. (Komite Sekolah, 24/09/2022)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara Sekolah yaitu Bapak Darwin Bangun, S, Si, S. Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 10.00 WIB terkait dengan laporan pertanggungjawaban Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menyebutkan:

“Sekolah menyusun laporan pengelolaan Dana Bos sesuai dengan format yang ditentukan yang didalamnya berisi RKAS, Buku kas umum, Buku kas tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu pajak. Serta semua lampiran dokumen yang dibutuhkan. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS oleh di SMK Musda Perbaungan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri pendidikan, riset, kebudayaan dan teknologi” (Bendahara Sekolah, 24/09/2022)

Berdasarkan paparan diatas, bendahara menjelaskan jenis pembukan dengan rincian berikut ini:

“BKU mempunyai fungsi untuk mencatat seluruh penerimaan Dana dari BOS, pungutan pajak serta jasa giro maupun seluruh pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral.

Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai.

Buku Pembantu Bank berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank. Sedangkan Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua

transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.”

Tim manajemen mengerjakan administrasi pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secara lengkap dengan menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melakukan konfirmasi Dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id; serta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima;

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Tata Usaha Sekolah yaitu Bapak Diki Irwanda, S. Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 11.00 WIB terkait dengan laporan pertanggungjawaban Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menjabarkan:

“Pihak sekolah membuat pembukuan dari Dana yang diperoleh satuan pendidikan untuk program BOS dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku”
.” (Kepala Tata Usaha, 24/0/2022)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Jurusan Teknik Pemesinan (TPM) yaitu Bapak Sugeng Syahputra, S.T pada hari Senin 26 September 2022 pukul 08.00 WIB terkait dengan laporan pertanggungjawaban Dana bantuan operasional sekolah SMK Musda Perbaungan beliau menjabarkan:

“Laporan pertanggungjawaban Dana BOS selalu disiapkan oleh sekolah sesuai dengan juknis yang berlaku di tahun ini karena karena sejauh ini

SMK MUSDA selalu tertib administrasi”. (Kepala Jurusan Teknik Pemesinan, 26/09/2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa SMK Musda Perbaungan Sekolah menyusun laporan pengelolaan Dana Bos sesuai dengan format yang ditentukan yang didalamnya berisi RKAS, Buku kas umum, Buku kas tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu pajak. Serta semua lampiran dokumen yang dibutuhkan dengan penjabaran jenis pembukuan yaitu BKU yang mempunyai fungsi untuk mencatat seluruh penerimaan Dana dari BOS, pungutan pajak serta jasa giro maupun seluruh pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral. Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Buku Pembantu Bank Berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank sedangkan Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Semua pembukuan dalam laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS.

4.2.5 Standar mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan.

Mutu pendidikan merupakan kemampuan atau kompetensi lembaga pendidikan dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendidikan, yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dengan seoptimal mungkin (Aminatul Zahroh,2014).Pengertian mutu pendidikan bukan merupakan suatu yang statis, melainkan suatu konsep yang bisa berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melatkat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pengertian tentang mutu pendidikan di sekolah adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

Berdasarkan dengan itu hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yakni Bapak Sulaiman, S,Kom pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 09.00 WIB yang berkaitan dengan standar mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan :

“Kalau pelaksanaan standar mutu kita ada tim penjamin mutu pendidikan sekolah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. dari disitulah semua nantinya bisa dilakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap guru-guru dalam

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian kepala sekolah juga menambahkan informasi bahwa standar mutu pendidikan yang sudah meningkat di SMK Musda Perbaungan adalah Standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, dan standard proses.” (Kepala Sekolah, 24/09/2022)

Kemudian wawancara dengan Komite Sekolah yaitu Bapak Suryanto, SE, pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 13.00 WIB yang berkaitan dengan standar mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan:

“Mutu pendidikan di sekolah sudah lebih baik, saya sering berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga guru-guru tentang perkembangan sekolah yang saya lihat sudah ada peningkatan sarana prasarana dan meningkatnya kinerja guru-gurunya” (Komite Sekolah, 24/09/2022)

Dilanjutkan wawancara dengan kepala sekolah Bendahara Sekolah Bapak Darwin Bangun, S,Si, S.Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 10.00 WIB yang berkaitan dengan standar mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan :

“Kepala sekolah membentuk tim penjamin mutu pendidikan dan membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah (RKS). Sekolah sudah melakukan standar pembiayaan dengan baik, terbukti dari mulai perencanaan anggaran, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban dari sekolah yang sudah sesuai dengan petunjuk dan skala prioritas yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pelaporan dan keberlangsungan kegiatan di sekolah. Mengenai standar mutu pendidikan yang sudah meningkat di SMK Musda Perbaungan adalah Standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, dan standard proses” Bendahara Sekolah, 24/09/2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Tata Usaha yaitu Bapak Diki Irwanda, S.Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 11.00 WIB

yang berkaitan dengan standar mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan :

“Menurut saya sekolah sudah melakukan standar proses, Standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, Standar PTK hal ini dapat kami rasakan dalam pemanfaatannya seperti terpenuhinya ATK untuk kebutuhan guru dan siswa. Disamping itu kebutuhan sarana prasarana sekolah terus melakukan pembenahan disana-sini untuk kenyamanan dan kemudahan yang dilakukan didalam lingkungan sekolah.” (Kepala Tata Usaha, 24/09/2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Jurusan Teknik Pemesinan (TPM) yaitu Bapak Sugeng Syahputra, S.T pada hari Senin 26 September 2022 pukul 08.00 WIB yang berkaitan dengan standar mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan:

“Standar mutu pendidikan di sekolah sudah dilakukan dengan baik, seperti pada standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi lulusan. Sekolah berupaya mendukung secara penuh dalam pengembangan standar ini. Sekolah juga bergerak secara perlahan dengan pendekatan kekeluargaan dalam menggali berbagai informasi untuk kemajuan sekolah.”(Kepala Jurusan Teknik Pemesinan, 26/09/2022)

Dari hasil beberapa paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa SMK Musda Perbaungan sudah berusaha menjalankan standar mutu pendidikan dengan baik berdasarkan acuan raport mutu sekolah. Agar kedelapan standar mutu pendidikan dapat terlaksana, pihak sekolah melakukan perencanaan anggaran Dana BOS melalui rapat dengan seluruh jajaran yang ada mengacu pada raport mutu yang ada sebab dapat lebih cepat terasa pemanfaatannya dalam

pengembangan sekolah. Standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, dan standard proses telah mengalami peningkatan.



4.2.6. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan.

Berdasarkan dengan itu hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu Bapak Sulaiman, S.Kom pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 09.00 WIB yang berkaitan dengan pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau menjelaskan:

“SMK Musda Perbaungan mengelola Dana BOS dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berarti bahwa sekolah memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Fokus saat ini pada peningkatan di bidang sarana dan prasarana difokuskan kepada pembelian alat dan bahan praktek, media pembelajaran yang dibutuhkan dan workshop peningkatan kompetensi guru dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri seperti PT. Rotella Persada Mandiri, PT. Astra International dan tempat kerja yang relevan dengan masing-masing bidang keahlian agar dapat menghasilkan mutu pendidikan yang kompeten pada masing-masing bidang keahlian.” (Kepala Sekolah, 24/09/2022).

Kemudian kepala sekolah juga menerangkan bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan hasil raport mutu pendidikan yang masih lemah yaitu literasi dan numerasi siswa

“Upaya yang kami lakukan adalah meningkatkan kesadaran siswa untuk pembiasaan literasi dengan cara mencanangkan program gerakan literasi sekolah dengan membaca buku selama 15 menit di jam pertama kemudian mengambil kesimpulan dari hasil bacaannya, menambah koleksi buku referensi di perpustakaan dan meningkatkan layanan internet agar siswa juga bisa mencari dan membaca materi dari sumber yang lain dari gawainya. Untuk numerasi, Guru memberikan latihan tambahan tentang soal AKM numerasi beserta pembahasannya agar kemampuan numerasi siswa meningkat dan bisa mengerjakan soal numerasi dengan baik”

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Komite Sekolah yakni Bapak Suryanto, SE, pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 13.00 WIB yang berkaitan dengan pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau mengatakan:

“Sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan dalam meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana sekolah, kegiatan peningkatan mutu guru ataupun kelengkapan media pembelajaran.” (Komite Sekolah, 24/09/2022)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bendahara sekolah yakni Bapak Darwin Bangun, S,Si, S.Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 10.00 WIB yang berkaitan dengan pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah terhadap mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau mengatakan :

“Pengelolaan Dana BOS di SMK MUSDA menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Yang pertama difokuskan kepada peningkatan sarana dan prasarana sekolah dengan melengkapi alat dan bahan praktek, penambahan buku referensi dipergustakaan agar menarik minat baca siswa serta melengkapi media pembelajaran.Selanjutnya Peningkatan Standar PTK difokuskan pada Dana kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru secara internal yaitu pengalokasian Dana untuk melaksanakan kegiatan workshop,sosialisasi dan in house training (IHT) sedangkan untuk eksternal,mengirim guru-guru produktif untuk melaksanakan peningkatan kompetensi baik dari lembaga pemerintah yaitu di P4TK, LPMP, LSP serta bekerjasama dengan lembaga Dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) seperti di PT. Astra Internasional, PT. Rotella Persada Mandiri dan tempat relevan lainnya.” (Bendahara Sekolah, 24/09/2022)

Selanjutnya Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala tata usaha sekolah yakni Bapak Diki Irwanda, S.Pd pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 11.00 WIB yang berkaitan dengan pengelolaan Dana bantuan

operasional sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau mengatakan :

“Saat ini saya lihat sekolah mengalami peningkatan dalam bidang mutu pendidikan, banyaknya siswa yang mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, futsal, paskibraka, kegiatan praktek otomotif, komputer. Adanya kegiatan workshop untuk dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu peningkatan kesejahteraan juga diperhatikan oleh pihak sekolah dengan memasukkan usulan kenaikan gaji dalam perencanaan anggaran Dana BOS.”(Kepala Tata Usaha, 24/09/2022)

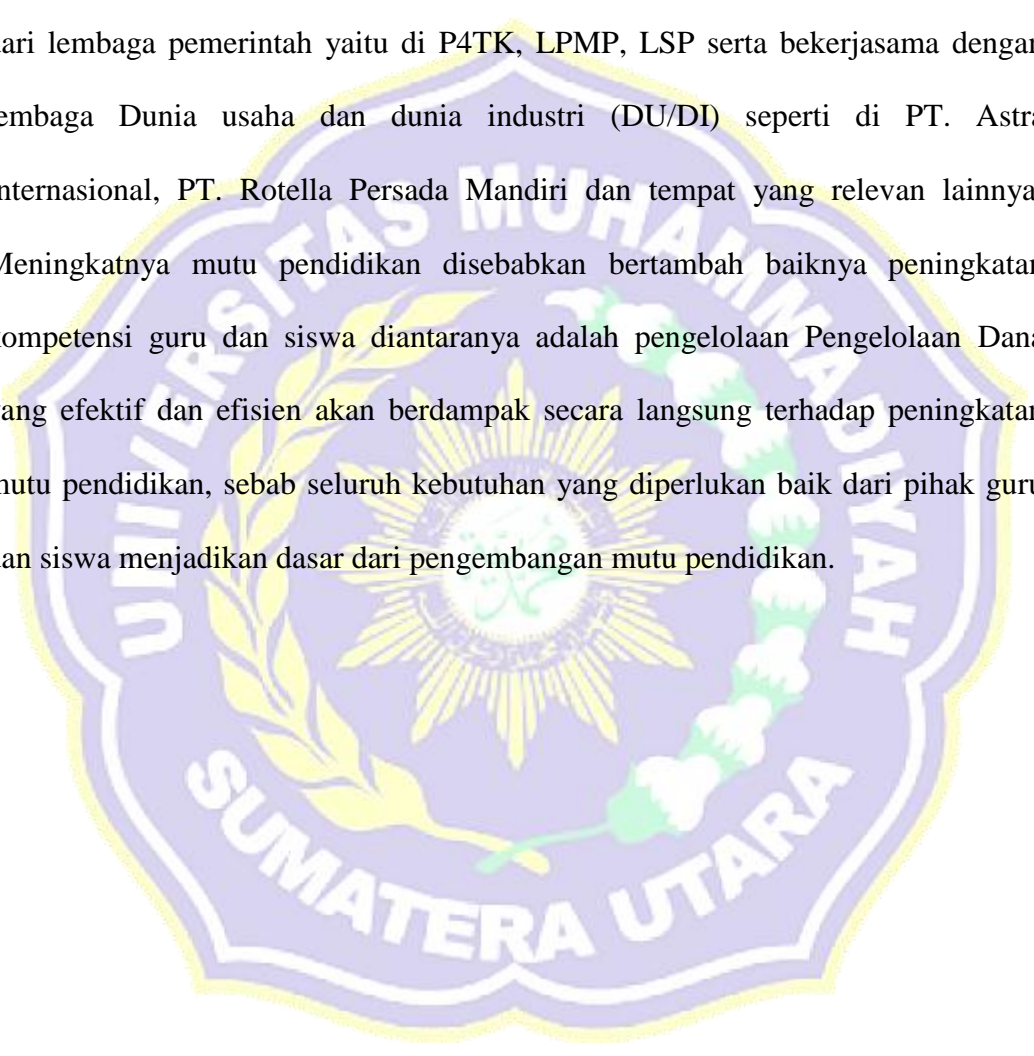
Setelah itu peneliti peneliti mewawancarai salah satu Kepala Jurusan Teknik Pemesinan (TPM) yaitu Bapak Sugeng Syahputra, S.T pada hari Senin 26 September 2022 pukul 08.00 WIB yang berkaitan dengan pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah terhadap pendidikan SMK Musda Perbaungan, beliau menjabarkan :

“Sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk penggunaan Dana BOS. Bisa kita lihat siswa kita banyak mengikuti kegiatan ekskul dan mengutuskan siswa-siswa di masing-masing jurusan untuk mengikuti lomba kegiatan sekolah (LKS), Pelaksanaan workshop peningkatan mutu pendidikan, mengirim perwakilan guru produktif untuk mengikuti pelatihan sebagai asesor, terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang relevan dengan masing-masing bidang keahlian. Semua ini tak terlepas dari efektif dan efisiennya pengelolaan anggaran Dana BOS di SMK Musda Perbaungan. Jadi apabila pengelolaannya tepat maka mutu pendidikan pasti akan meningkat.”(Kepala Jurusan Teknik Pemesinan, 26/09/2022)

Berdasarkan Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sekolah telah meningkatkan sarana dan prasarana untuk sekolah, guru, staf dan siswa. Sekolah perlu lebih menggiatkan pelaksanaan gerakan literasi sekolah dengan menyediakan buku teks dan referensi pengayaan materi mengenai soal dan

pembahasan AKM literasi dan numerasi sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa agar nilai mutu sekolah dibidang literasi dan numerasi lebih meningkat.

Selain itu sekolah melaksanakan workshop peningkatan mutu pendidikan, mengirim guru-guru produktif untuk melaksanakan peningkatan kompetensi baik dari lembaga pemerintah yaitu di P4TK, LPMP, LSP serta bekerjasama dengan lembaga Dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) seperti di PT. Astra Internasional, PT. Rotella Persada Mandiri dan tempat yang relevan lainnya. Meningkatnya mutu pendidikan disebabkan bertambah baiknya peningkatan kompetensi guru dan siswa diantaranya adalah pengelolaan Pengelolaan Dana yang efektif dan efisien akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan, sebab seluruh kebutuhan yang diperlukan baik dari pihak guru dan siswa menjadikan dasar dari pengembangan mutu pendidikan.



4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang secara detail terhadap hasil penelitian dengan teori yang digunakan sebelumnya. Setelah pengumpulan data dari lapangan serta berbagai macam temuan yang berhasil peneliti temukan maka dapat dikemukakan beberapa pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan : 1) Perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan, 2) Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan, 3) Pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan, 4) Laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan, 5) Standar mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan, 6) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan.

4.3.1 Perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan.

Dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa Perencanaan keuangan SMK Musda Perbaungan disusun dengan cara membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Sekolah. Penyusunan rencana anggaran diawali dengan identifikasi tujuan setelah mengkaji visi, misi sekolah dan melakukan evaluasi diri sekolah (EDS).

Pada awal tahun pelajaran, Proses pertama dibentuk tim manajemen bos tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab, bendahara, komite sekolah, kepala program keahlian, perwakilan guru, perwakilan orang tua, serta perwakilan tendik. Kemudian masing masing bidang diberikan buku permintaan belanjaan selama 1 tahun dan masing masing kepala bidang keahlian membuat anggaran belanja tersebut, Hal ini dilakukan agar dapat menggali secara detail apa saja yang memang dibutuhkan oleh sekolah, guru, dan siswa.

Selanjutnya pihak sekolah akan mengoleksi program-program yang diajukan oleh para guru, wakil kepala sekolah, kepala jurusan, komite sekolah, bendahara, kepala tata usaha yang hadir dalam rapat penyusunan RKAS.

Kemudian tim manajemen BOS memilah-milah mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Adapun yang menjadi skala prioritas kebutuhan sekolah akan menjadi hal yang akan dipenuhi dalam penggunaan Dana BOS yang dituangkan ke dalam aplikasi RKAS sementara yang belum dijadikan prioritas tetap mendapat perhatian dan akan dimasukkan ke dalam daftar antri untuk kebutuhan yang mendatang. Artinya ada koordinasi yang baik antara manajemen/pengelola keuangan dalam hal ini pengelola Dana BOS dengan warga sekolah. Kemudian dalam penyusunan anggaran terdapat pengalokasian anggaran berdasarkan pemetaan skala prioritas.

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah regular bab VI Pasal 41 ayat 2 yang berbunyi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS membentuk tim BOS sekolah yang terdiri atas:

a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab; b. bendahara sekolah; dan c. anggota. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas satu orang dari unsur guru; satu orang dari unsur Komite Sekolah; dan satu orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik. Unsur orang tua/wali Peserta Didik merupakan orang tua/wali selain Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan anggaran keuangan dari Dana BOS SMK Musda Perbaungan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan manajemen pengelolaan BOS dimana sekolah diberi kebebasan dalam perencanaan dan pengelolaan dengan komponen yang sudah ditetapkan persentasenya oleh pemerintah berdasarkan juknis BOS. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam merencanakan penggunaan anggaran Dana BOS pihak sekolah selalu mengupayakan secara maksimal seperti penggunaan Dana yayasan untuk kemajuan pendidikan SMK Musda Perbaungan agar guru dan siswa dapat meningkat dari segi mutunya.

4.3.2 Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan.

Pemerintah dan juga masyarakat harus dapat mendorong pemanfaatan Dana BOS agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pemanfaatan Dana BOS yang baik dapat meningkatkan kualitas serta terpenuhinya kebutuhan sekolah, guru, dan juga siswa. Begitu juga pemanfaatan Dana yang baik dapat mengembangkan kreativitas guru dan siswa. Pengelolaan keuangan BOS akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran (Koswara, 2010:4)

Pemanfaatan Dana BOS yang baik adalah sesuai petunjuk teknis yang telah dibuat oleh pemerintah. Maka sekolah hendaknya menjalankan kewajibannya dalam penggunaan anggaran tersebut secara tepat. Terdapat 4 cara agar pemanfaatan Dana BOS tepat sasaran:

1. Sekolah haruslah mengetahui, memahami dan menjalankan petunjuk teknis yang ada.
2. Sekolah harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan sekolah lain.
3. Sekolah harus berdiskusi dengan dinas pendidikan dan inspektorat.
4. Menanamkan dan menjalankan sikap amanah.

Penggunaan Dana BOS harus sesuai Standar nasional pendidikan (SNP) yang merujuk pada petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Bab V

Pasal 26 dengan komponen penggunaan Dana anggaran dengan rincian antara lain: Penerimaan Peserta Didik baru;Pengembangan perpustakaan;Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;Pembiayaan langganan daya dan jasa; Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;Pengadaan alat multimedia pembelajaran; Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau Pembayaran honor. Ketentuan itu harus dipatuhi agar Satuan Pendidikan tidak menggunakan Dana BOS tersebut diluar ketentuan yang ada dan semua itu akan tertuang dalam RKAS

Pemanfaatan Dana BOS Reguler SMK MUSDA di tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 2,424,000,000 yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Standar Isi

Standar yang pertama adalah standar isi. Yang diatur dalam standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang

pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten Dengan kegiatan: Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan yang digunakan untuk Workshop validasi RPP semua mapel dalam MGMPS/MGMPK sebesar Rp.22,846,000

2. Pengembangan Standar Proses

Tiap dasar pendidikan melaksanakan perencanaan proses pembelajaran, penerapan proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran guna terlaksananya proses pembelajaran yang efisien serta berdaya guna. Ketentuan mengenai standar proses diatur dalam Permendikbud RI Nomor 65 tahun 2013.

Dengan kegiatan Pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pembiayaan pengembangan perpustakaan, pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 581,439,758

3. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik adalah tenaga profesional yang bekerja merancang serta melakukan proses pembelajaran, memperhitungkan hasil angka pembelajaran, memberi pelajaran, dan melaksanakan riset serta dedikasi pada warga, terutama untuk pengajar pada perguruan tinggi. Sebaliknya tenaga kependidikan bekerja melakukan administrasi, pengurusan kompetensi selaku agen pembelajaran, sehat jasmani serta rohani, dan mempunyai keahlian untuk menciptakan tujuan pembelajaran nasional

Dengan kegiatan Pembiayaan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 73,250,000

4. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah

Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan standar minimal mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat main, tempat rekreasi serta berkreasi, dan sumber belajar lain, yang dibutuhkan buat mendukung proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi serta komunikasi. Ketentuan mengenai standar sarana prasarana ini dituangkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.

Dengan kegiatan: Pengembangan perpustakaan, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 458,489,644

5. Pengembangan Standar Pengelolaan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 mengenai Standar Pengurusan Pembelajaran oleh Satuan Pendidikan Dasar serta Menengah. Satuan pendidikan pada tahapan pembelajaran dasar serta menengah mempraktikkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan independensi, kemitraan, keikutsertaan, transparansi, serta akuntabilitas

Dengan kegiatan: penerimaan peserta didik baru pelaksanaan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi sekolah, pembiayaan layanan dan jasa sebesar Rp.139,742,000

6. Pengembangan standar pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, serta biaya individu. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana diartikan di atas mencakup biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Biaya perorangan begitu juga diartikan pada di atas mencakup biaya pendidikan yang wajib dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan cara teratur serta berkepanjangan.

Ketentuan mengenai standar pembiayaan pembelajaran ini diatur dalam Permendiknas RI Nomor 69 Tahun 2009.

Dengan kegiatan: Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan pembayaran honor sebesar Rp. 1,083,905,596

7. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian

Standar penilaian pendidik merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan mekanisme, prosedur, serta instrumen evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan dengan cara berkelanjutan untuk memantau proses, perkembangan, serta pemenuhan SNP merupakan Standar Kompetensi Pengajar serta Daya Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), serta Standar Pembiayaan. Bagian yang tercantum pada bagian proses merupakan Standar Isi, Standar Proses, serta Standar Evaluasi, sebaliknya bagian yang tercantum pada komponen output merupakan Standar

Kompetensi Lulusan (SKL). Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud RI Nomor 66 Tahun 2013.

Dengan kegiatan: Pembiayaan assessment/evaluasi pembelajaran dan ekstra kurikuler dalam penyusunan soal ujian sekolah sebesar Rp. 64,327,002

Standar Pengelolaan. (RKAS terlampir).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya SMK MUSDA telah mengikuti pedoman yang ada di dalam Permendikbud Ristek RI tahun 2022 nomor 2 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS reguler. Dalam penggunaan anggaran, sekolah memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana sekolah dengan memenuhi alat praktek dan media pembelajaran yang dibutuhkan guru dan siswa sebagai penunjang kelancaran proses belajar mengajar, selain itu, Sekolah juga mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru dan mengikutsertakan guru-guru produktif dalam pelatihan yang relevan dengan bidang keahliannya masing-masing agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMK MUSDA. Terpenuhinya komponen yang sesuai dalam rapat RKAS membuktikan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah diserap dengan baik sesuai dengan visi misi sekolah.

Lasari (2011:2) mengemukakan dua jenis kegiatan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan anggaran keuangan sekolah, yaitu: 1) kegiatan pengendalian keuangan sekolah, dan 2) kegiatan proses pencatatan keuangan sekolah. Kegiatan pengendalian keuangan sekolah merupakan usaha-usaha seorang administrator

agar kegiatan pengadaan dan penggunaan keuangan sekolah mengarah secara tepat pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal berkat adanya tindakan-tindakan secara bertanggung jawab, terbuka, jujur, tertib, cermat, kreatif, efektif, dan efisien. Pengendalian keuangan sekolah ini terutama pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yakni suatu pernyataan mengenai uraian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sekolah sebagai belanja sekolah selama satu tahun anggaran.

4.3.3 Pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

SMK Musda Perbaungan

Penggunaan Dana BOS harus memiliki pengawasan agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan adalah suatu aktivitas atau tindakan pihak manajemen/pimpinan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Menurut Kadarisman (2015:173) pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan sangat penting dilakukan agar menjamin tercapainya penggunaan Dana BOS secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permendikbud yang berlaku dalam pengawasan penggunaan Dana BOS haruslah diperlihatkan langsung kepada komite sekolah, dan juga warga sekolah. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan keuangan dan mengoreksi kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. Pengawasan dapat secara internal dan eksternal, dapat pula dilakukan secara struktural maupun fungsional yang mencakup pemeriksaan, pembinaan dan evaluasi.

Pengawasan dari internal dan eksternal menjadikan penggunaan Dana bantuan operasional sekolah lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu dalam pengawasan terhadap pembelian barang dan jasa serta dapat mengantisipasi penyalahgunaan pengelolaan Dana BOS sekolah. Kemudian pengawas ini juga dapat mengurangi biaya pembelanjaan barang dan jasa yang belum terlalu dibutuhkan. Inilah yang menjadi kunci dalam pengawasan untuk jadi pihak pengguna Dana tidak dapat menyalahgunakan penggunaan Dana. Pengawasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga seluruh anggota masyarakat artinya pengawasan dapat bersama-sama pemerintah, warga sekolah serta masyarakat. Dalam pengawasan penggunaan Dana BOS SMK di Musda

Perbaungan menggunakan 2 pihak yakni pihak internal (komite dan guru) dan juga pihak eksternal (dinas pendidikan, inspektorat, badan pemeriksa keuangan). Sedangkan pengendalian cenderung dilakukan oleh kepala sekolah, sebagai upaya korektif dan antisipatif terhadap pelaksanaan tugas pengelola.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan Dana BOS di SMK MUSDA sudah Sesuai dengan petunjuk teknis permendikbud nomor 2 tahun 2022 bab VI yang menyatakan bahwa Pengelolaan dan pengawasan penggunaan Dana BOS Reguler dilakukan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah.

4.3.4 Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Musda Perbaungan.

Suatu lembaga pendidikan dalam mempertanggungjawabkan Dana hendaknya mengacu kepada 3 prinsip yakni akuntabel, fleksibel dan transparan. Fleksibel dalam artian laporan dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada, tidak kaku dalam pelaporan, dan apabila tidak sesuai maka Dana akan dikembalikan kepada Negara. Akuntabel dalam arti penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan logis sesuai peraturan perundang-undangan. Serta prinsip transparansi dimana penggunaan Dana BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sekolah harus

melakukan evaluasi jika dalam laporan pertanggungjawaban sudah sesuai ataupun ada perbaikan.

Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan) diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatan. Secara umum, laporan pelaksanaan program mencakup statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan Dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. SMK MUSDA telah menyusun laporan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan format yang ditentukan yang didalamnya berisi RKAS, Buku kas umum, Buku kas tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu pajak. Serta semua lampiran dokumen yang dibutuhkan dengan penjabaran jenis pembukuan yaitu BKU yang mempunyai fungsi untuk mencatat seluruh penerimaan Dana dari BOS, pungutan pajak serta jasa giro maupun seluruh pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral. Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Selanjutnya Buku Pembantu Bank yang Berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank sedangkan Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat

semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Semua pembukuan dalam laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS.

SMK MUSDA telah menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut: 1) melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS reguler dengan melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler; 2) realisasi penggunaan Dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan; 3) laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah.

4.3.5 Standar mutu pendidikan SMK Musda Perbaungan.

Pelaksanaan seluruh kegiatan yang berada di lingkungan sekolah mengacu pada delapan standar mutu pendidikan yang telah disampaikan oleh pemerintah. SMK Musda perbaungan selaku lembaga yang mengemban tugas ini selalu melakukan evaluasi terhadap seluruh standar mutu pendidikan. Rapor mutu menjadi sebuah pijakan penting dalam merubah dan mengembangkan program-program yang dimiliki sekolah untuk lebih baik. SMK MUSDA memiliki tim penjamin mutu pendidikan sekolah, yang dibuat berdasarkan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri sekolah yang mengacu kepada

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hal itu maka dibuatlah pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap guru-guru dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Di Dalam rapor mutu pendidikan tergambar apa saja yang telah tercapai dan apa saja yang belum tercapai. Maka apabila sekolah ingin mencapai tujuan dengan cepat sebaiknya memperhatikan rapor mutu tahun lalu agar pemanfaatan penggunaan Dana bantuan operasional sekolah dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Di Dalam rapor mutu juga tergambar kebutuhan-kebutuhan yang dapat kita lihat sebagai kebutuhan yang mendesak dan mana yang belum mendesak dan itu dapat kita lihat dari nilai mana yang masih rendah. Maka haruslah memprioritaskan nilai yang rendah tadi agar berubah menjadi lebih baik lagi.

Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yakni: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian pendidikan merupakan acuan utama bagi SMK Musda Perbaungan dalam mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Tuntutan profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga diminta oleh pihak masyarakat yang memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta

didik. Alasannya tanpa adanya profesionalisme guru maka akan sangat mustahil siswa dapat mencapai kualitas hasil belajar yang maksimal

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Berdasarkan hal tersebut sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan SPMI dalam rangka mencapai atau melampaui 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

4.3.6 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan.

Pengelolaan Dana menjadi suatu hal yang mutlak dalam menjalankan roda belajar mengajar. Peningkatan mutu pendidikan baik dari pihak sekolah, guru, dan juga siswa disebabkan pengelolaan Dana yang baik dan transparan oleh pihak sekolah. Mulyasa (2006:177) sesuai dengan semangat manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah berwenang penuh untuk mengatur masalah pendanaan pendidikan di sekolahnya. Meskipun demikian, ia harus tetap memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan perincian pengeluaran.

Menurut Sulasmi (2022:13) Pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar Dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Pemetaan akan kebutuhan sekolah haruslah dilakukan agar dapat tercapai tujuan yang tepat sasaran. Hal ini menyebabkan meningkatnya paradigma positif dan kepercayaan dari masyarakat, guru-guru dan siswa. Mutu pendidikan sangatlah penting dalam mengukur keberhasilan suatu institusi lembaga pendidikan. Pengelolaan SMK Musda Perbaungan mengalami peningkatan dalam pendidikan terbukti dengan diraihnya berbagai macam kejuaraan di tingkat

kabupaten dan provinsi. Diantara upaya dalam peningkatan mutu pendidikan dalam penggunaan Dana BOS adalah:

1. Melaksanakan penggunaan sesuai dengan perencanaan yang telah dimusyawarahkan sehingga tepat sasaran.
2. Menggunakan anggaran untuk kepentingan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. SMK Musda memiliki sarana dan prasarana yang sudah baik dari segi gedung sekolah, ruangan belajar yang memadai, memiliki ruang praktek yang lengkap di masing-masing bidang keahlian, memiliki media/alat pendukung proses pembelajaran, ruang perpustakaan, ruang BK, ruang UKS, ruang guru, Ruang Tata usaha, ruang LSP, kamar Mandi untuk guru dan murid semua sudah terpenuhi.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru sehingga guru dapat lebih profesional dalam mengemban tugasnya. Seperti yang dikemukakan oleh sukywati dalam kutipan Rohman (2017:34) tentang salah satu prinsip manajemen (pengelolaan) yaitu Penggajian, Sederhananya prinsip ini menegaskan bahwa manajemen juga harus memperhatikan besaran gaji/upah yang diberikan kepada anggota dalam lingkaran suatu manajemen. Pemberian gaji/upah harus berasaskan keadilan dan harus memberikan kepuasan.

Sehingga dengan gaji/upah yang memuaskan diharapkan nantinya dapat merangsang para anggota lingkaran suatu manajemen bekerja secara lebih maksimal dan lebih disiplin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

- 4 Meningkatkan kesadaran siswa untuk pembiasaan literasi dengan cara mencanangkan progam gerakan literasi sekolah. Untuk numerasi, Guru memberikan latihan tambahan tentang AKM numerasi. Menambah buku referensi dipergustakaan dan meningkatkan layanan internet.
- 5 Peningkatan standar sarana dan prasarana yang difokuskan kepada pembelian alat dan bahan praktek,serta media pembelajaran.Standar PTK difokuskan pada Dana kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru secara internal yaitu pengalokasian Dana untuk melaksanakan kegiatan seperti workshop,sosialisasi dan in house training (IHT) sedangkan untuk eksternal,mengirim guru-guru produktif untuk melaksanakan peningkatan kompetensi baik dari lembaga pemerintah yaitu di P4TK,LPMP,LSP serta bekerjasama dengan lembaga Dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) seperti di PT. Astra Internasional, PT. Rotella Persada Mandiri dan tempat yang relevan lainnya.”

Dari pembahasan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, laporan pertanggungjawaban Dana Bos dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan pengelolaan Dana Bos di SMK Musda sudah sesuai Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pengelolaan dan pelaporan Dana bantuan operasional sekolah reguler oleh sekolah yang menyatakan bahwa:

1. Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
2. Perencanaan mengacu pada raport mutu sekolah
3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler.
4. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan Dana.
5. Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah.
6. Hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat
7. Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah yang berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan serta analisisnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMK MUSDA perbaungan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bos dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan manajemen pembiayaan Dana BOS di SMK Musda Perbaungan disusun oleh beberapa pihak yang ada di sekolah yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, kepala tata usaha, wakil kepala sekolah, kepala jurusan, serta komite sekolah.
2. Pemanfaatan Anggaran Dana BOS digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan layanan pendidikan dan mutu pendidikan di sekolah yang telah sesuai komponen penggunaan Dana BOS.
3. Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan Dana BOS di SMK Musda Perbaungan pada terdiri dari dua pengawasan yaitu pengawasan dari pihak internal dan pihak eksternal sekolah. Adapun pihak internal sekolah yang

melakukan pengawasan adalah dari serta komite sekolah dan warga sekolah, sedangkan pihak dari eksternal adalah cabang dinas pendidikan provinsi, inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. SMK MUSDA telah menyusun laporan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan format yang ditentukan yang didalamnya berisi RKAS, Buku kas umum, Buku kas tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu pajak. Serta semua lampiran dokumen yang dibutuhkan.
5. Rapor mutu menjadi sebuah pijakan penting dalam memperbaiki dan mengembangkan program-program yang dimiliki sekolah agar mutu sekolah lebih meningkat ditahun selanjutnya.
6. Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan dalam penggunaan Dana BOS adalah : 1) Melaksanakan penggunaan Dana BOS sesuai dengan perencanaan yang telah dimusyawarahkan sehingga tepat sasaran, 2) Menggunakan anggaran untuk kepentingan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kompetensi guru, 3) Meningkatkan kesejahteraan guru sehingga guru dapat lebih profesional dalam mengemban tugasnya, 4) Meningkatkan prestasi siswa baik dalam bidang akademik dan non akademik, 5) Menggunakan anggaran Dana untuk kegiatan-kegiatan yang relevan dengan perkembangan dunia Pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Perencanaan anggaran Dana BOS adalah suatu pergerakan awal yang mendasari suatu program yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan. Perencanaan yang baik dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan yang akan dipenuhi melalui musyawarah pihak sekolah.
- b. Pemanfaatan penggunaan Dana BOS harus sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam perencanaan anggaran Dana BOS. Sekolah dapat membuat pemetaan skala prioritas akan kebutuhan dari pihak sekolah.
- c. Proses pengawasan yang baik akan meningkatkan penggunaan Dana BOS lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- d. Pelaporan yang baik dan transparansi merupakan kunci dalam meyakinkan masyarakat baik itu masyarakat sekolah (komite, guru, siswa) maupun masyarakat luar sekolah (pemerintah).

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi sekolah, instansi terkait, guru, komite sekolah dalam merencanakan, memanfaatkan, mengevaluasi,

mengawasi, melaporkan penggunaan Dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara tepat, efektif, akuntabel dan transparan. Hal ini diharapkan terwujudnya peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di sekolah.



5.3 Saran

Dari hasil kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk kemajuan pihak sekolah terkait dengan pengelolaan Dana BOS dalam di SMK Musda Perbaungan. Maka penulis memberikan saran yang mungkin bisa menjadi gambaran, yaitu:

1. Pengelolaan pembiayaan pendidikan hendaknya mengacu pada seluruh prinsip Dana Bos yakni fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan agar realisasi penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis.
2. Kepada pihak pengawas internal dan eksternal, agar model inspeksi mendadak juga dipakai dalam pengawasan BOS ini, agar hasil riil penggunaan Dana BOS dapat terlihat dan pihak sekolah tetap mempersiapkan segala pembukuan dan dokumentasi yang dibutuhkan sesuai dengan bulan yang telah terlewati.
3. SMK Musda diharapkan membuat program-program dan kegiatan yang mendorong dan mendukung peningkatan kualitas prestasi akademis maupun non akademis siswa.
4. SMK Musda Perbaungan perlu mendorong para guru dan siswa agar meningkatkan budaya membaca di sekolah dengan memfasilitasi berbagai sarana buku perpustakaan dan memperkaya buku pelajaran dan buku

referensi yang berkaitan dengan pendidikan dalam upaya meningkatkan raport mutu pendidikan yang masih rendah dibidang literasi dan numerasi.

5. Tim Bos SMK Musda Perbaungan perlu merancang anggaran ditahun berikutnya untuk membuat perpustakaan digital agar siswa lebih mudah mencari buku-buku baca lewat perpustakaan digital.
6. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum sesuai dengan aturan petunjuk teknis bisa diperbaiki sesuai aturan, agar Dana BOS dapat digunakan efektif, efisien, dan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Alkadri, Hanif. (2011). Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan.
Padang: Working Paper. FIP UNP.

Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Rineka Cipta.

Arwildayanto, dkk. 2017. Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan
Bandung: Widya Padjajaran.

Aminatul Zahro,2014. Total Quality Management Teori & Praktik Manajemen
Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Budi Ilham, Maliki Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap
Kualitas Pendidikan di Indonesia

Depdiknas,.2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem
pendidikan nasional.

Eti Rochaety, dkk.2005. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta. bumi
Aksara

Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.

Fattah, Nanang. 2011. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Hari Suderadja, 2000. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika.

Hibrida, Anas Romzy 2013. Studi efektivitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS). Jember: Universitas Jember.

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/pusat>

Kemdikbud, 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 66 Tahun 2013. Jakarta: Kemdikbud

Kemdikbud, 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemdikbud

Koswara, E. 2010. Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif. <http://koswaraero.blogspot.com/2010/04/pengelolaan-manajemen-keuangan-sekolah.html>. Diakses tanggal 4 Januari 2013

Kadarisman, M. 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rajawali Pers, Jakarta

Lasari, E. 2011. Manajemen Keuangan Sekolah. <http://winawimala.wordpress.com/2011/04/11/manajemen-keuangan-sekolah/>. Diakses tanggal 4 Januari 2013

Margono, S. 2010. Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta.

- Moleong, Lexy. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyono, 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: ArRuzz Media
- Mulyasa, E. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Theresito.
- Nur Azman. 2013. Kamus Standar Bahasa Indonesia. Bandung: Fokusmedia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendikbud Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah.
- Purwari, Idah. 2020. Analisis Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Rayon IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Tesis. Umsu.
- Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta. Binaman Aksara, Serikat Perusahaan Pers, 2018. <http://www.spsindonesia.org/>

- Rohman.Abd. 2017.Dasar-Dasar Manajemen.Malang: Intelegensia Media.
- Rohman, M & Sofan Amri. 2012. Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran.Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sidig, Umar&Choiri, Miftachul.2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.CV.Nata Karya
- Sugiyono.2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta
- Sugiarto. 2017. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- SulasmI, Emilda, 2020. Manajemen dan kepemimpinan. Depok. PT. Raja Grafindo Persada
- SulasmI, Emilda. 2021. Kebijakan Dan Permasalahan Pendidikan. Medan. Umsu Press.
- SulasmI, Emilda. 2022. Penganggaran Dan Keuangan Pendidikan. Medan. Bildung.

- Sudrajat, Hari, 2005. Manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah; Peningkatan mutu Pendidikan melalui Implementasi KBK Bandung: Cipta Cekas Grafika
- Syafaruddin, 2012 Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Veithzal, Rivai. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Syahbuddin, Ahmad. 2021. Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Di Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Kota Langsa). Tesis.Umsu.
- Sukwiaty, dkk. 2016. Ekonomi. Yogyakarta: Yudhistira.
- Riyuzen Praja, Tuala.2018. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah. Lampung: Lintang Rasi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahyono, 2017. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) di MTs Mafatihul Huda Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. JIEM (Journal of Islamic Education Manajemen) Vol. 3 No.2 ISSN 2549-0877
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN

TABULASI HASIL WAWANCARA

PERENCANAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

SEKOLAH

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Kepala Sekolah (Bapak Sulaiman, S.Kom)	Bagaimana proses penyusunan RKAS yang dilakukan oleh SMK Musda Perbaungan?	Dalam penyusunan RKAS, pertama kita buat adalah sebuah pertemuan dari beberapa bidang baik itu mulai dari kurikulum, kesiswaan, sarpras dan ketua-ketua jurusan, kemudian kita juga melibatkan guru, perwakilan tendik, perwakilan orang tua, komite sekolah ini, nah setelah itu kami menerima masukan dari masing-masing bidang apa saja yang ingin diprogramkan untuk tahun depannya sehingga dengan masukan-masukan tersebut kita sama-sama susun mana-mana saja yang bisa dicover oleh pembiayaan di Dana BOS tersebut
		Apakah yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran di SMK Musda Perbaungan?	Penyusunan RKAS dibuat berdasarkan Raport mutu yang berfungsi sebagai penjaminan mutu internal dimana indikatornya mengukur delapan capaian standar nasional. Dari raport mutu itu kira-kira apa yang menjadi nilai ataupun poin yang masih merah akan menjadi skala prioritas bagi sekolah

		Bagaimana keterlibatan guru-guru dalam penyusunan RKAS di SMK Musda Perbaungan?	Mengenai keterlibatan guru, memang tidak semua guru kita libatkan secara langsung namun kita berikan kesempatan kepada guru itu untuk mengajukannya dengan Waka Kurikulum dan Waka Kurikulum nanti akan menyampaikan pada saat rapat RKAS.
2.	Bendahara Sekolah (Bapak Darwin Bangun, S.Si, S.Pd)	Bagaimana proses penyusunan RKAS yang dibuat oleh SMK Musda Perbaungan?	Proses pertama dibentuk tim manajemen bos tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab, bendahara, komite sekolah, kepala program keahlian, perwakilan guru, perwakilan orang tua, serta perwakilan tendik. Kemudian masing masing bidang diberikan buku permintaan belanjaan selama 1 tahun dan masing masing bidang membuat anggaran belanja tersebut, Hal ini dilakukan agar dapat menggali secara detail apa saja yang memang dibutuhkan oleh sekolah, guru, dan siswa dengan melihat skala prioritas kebutuhan sekolah kemudian dituangkan ke dalam aplikasi RKAS
		Apakah yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran di SMK Musda Perbaungan?	Perencanaan berdasarkan hasil rapor mutu pendidikan dan perencanaan penggunaan Dana BOS didasarkan dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Permendikbud sehingga apa saja item-item yang dapat dibiayai atau dibelanjakan oleh Dana BOS agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai petunjuk teknisnya
3.	Komite Sekolah	Apakah Bapak dilibatkan dalam penyusunan	Ya, saya diundang waktu menyusun anggaran BOS pas awal tahun buk. Di Dalam rapat ada kepala program

	(Bapak Suryanto, SE)	anggaran Dana BOS di SMK Musda Perbaungan?	keahlian dan perwakilan guru yang menyampaikan kepada kepala sekolah dan bendahara apa saja yang diperlukan oleh masing-masing jurusan. Penjelasan itu untuk menentukan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas anggaran sekolah.
		Bagaimana proses penyusunan anggaran Dana BOS di SMK Musda Perbaungan?	Proses penyusunan dan perencanaan anggaran secara transparan dan sesuai petunjuk teknis yang ada dengan mengedepankan skala prioritas yang mana sangat urgent dan mana yang masih bisa ditahan dalam penggunaan anggaran biayanya
4.	Kepala Tata Usaha (Diki Irwanda, S.Pd)	Siapa sajakah yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran Dana BOS SMK Musda Perbaungan?	Saya sebagai perwakilan tenaga kependidikan dan warga sekolah lainnya baik itu bendahara, kepala jurusan, perwakilan guru, wakil kepala sekolah, perwakilan orang tua murid dan juga komite sekolah diikutsertakan dalam rapat perencanaan kegiatan anggaran BOS.
		Bagaimana proses penyusunan perencanaan anggaran Dana BOS di SMK Musda Perbaungan?	Dalam rapat kami bisa memberikan usulan-usulan serta mempertimbangkan kebutuhan masing-masing jurusan baru kemudian tim BOS memetakan mana yang menjadi prioritas utama
5.	Kepala Teknik Pemesinan (Bapak Sugeng Syahputra, S.T)	Bagaimana keterlibatan Bapak dalam penyusunan anggaran Dana di SMK Musda	Dalam rapat perencanaan penyusunan RKAS saya sebagai kepala jurusan teknik pemesinan dilibatkan dalam rapat pengelolaan bos. Disamping itu, kepala sekolah juga melibatkan semua kepala

	Perbaungan?	program keahlian, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sarpras dan kesiswaan, kepala tata usaha dan juga komite artinya semua perwakilan warga sekolah diikutsertakan dalam penyusunan anggaran.
	Bagaimana proses perencanaan anggaran Dana BOS SMK Musda Perbaungan?	Dalam rapat tersebut, kemudian masing; masing bidang diberikan buku permintaan perbelanjaan selama satu tahun kedepan dan membuat anggaran belanja tersebut untuk diserahkan kepada bendahara



**TABULASI HASIL WAWANCARA
PEMANFAATAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH**

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Kepala Sekolah (Bapak Sulaiman, S.Kom)	Bagaimana pelaksanaan dalam pemanfaatan Dana BOS di SMK Musda Perbaungan?	Pemanfaatan Dana BOS sudah berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS yang pelaksanaannya sudah sesuai perencanaan anggaran sesuai dengan skala prioritas kebutuhan sekolah dan memenuhi standar nasional pendidikan yang tertuang dalam RKAS yang seluruh komponen penggunaannya sesuai dengan juknis yang berlaku.
2.	Komite Sekolah (Suryanto, SE)	Bagaimana pelaksanaan dalam pemanfaatan Dana BOS di SMK Musda Perbaungan	Kepala sekolah melakukan prioritas terhadap peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Dan kebutuhan penunjang proses pembelajaran
3.	Bendahara Sekolah (Bapak Darwin Bangun, S.Si, S.Pd)	Bagaimana pelaksanaan dalam pemanfaatan Dana BOS di SMK Musda Perbaungan?	Pemanfaatan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah tentang apa saja yang telah dibelanjakan oleh sekolah dan kebermanfaatannya bagi sekolah, guru, dan siswa. Pengelolaan Dana BOS saya lihat tepat guna sesuai dengan kebutuhan prioritas yaitu peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kompetensi guru yang memang sangat penting dan dapat langsung digunakan oleh sekolah dan guru-guru
4.	Kepala Tata Usaha (Bapak Diki	Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan	Pemanfaatan Dana BOS saya lihat tepat guna sesuai dengan kebutuhan prioritas seperti peningkatan sarana

	Irwanda, S.Pd)	Dana BOS di SMK Musda Perbaungan?	prasarana sekolah dan peningkatan kompetensi guru melalui workshop.
5.	Kepala Teknik Pemesinan (Bapak Sugeng Syahputra, S.T)	Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Dana BOS di SMK Musda Perbaungan?	Sebagai ketua jurusan teknik pemesinan dan guru produktif saya sangat merasakan manfaat dari Dana Bos ini. Saya pernah pelatihan assessor penggunaan Dana BOS pada waktu itu dimana assessor itu untuk meningkatkan kompetensi kami, karena assessor itu bisa dikatakan penguji, kebetulan kami punya LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Setelah dapat sertifikat assessor maka kami berhak mewakili pusat untuk menguji anak-anak dan saya ditunjuk sebagai manajer sertifikasi dan itu dibantu penDanaannya dari Dana BOS. Pelatihan-pelatihan ini juga salah satu visi misi sekolah kan meningkatkan kompetensi guru. Dan itu berdampak kepada peningkatan kompetensi siswa. Kalau untuk penyaluran alat-alat sudah terpenuhi. Karena untuk membeli alat-alat itu kan sebagian dari Dana BOS. Maka kami teknik pemesinan mengambil jargon teknik permesinan yang berkualitas.

**TABULASI HASIL WAWANCARA
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH**

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Kepala Sekolah (Bapak Sulaiman, S.Kom)	Siapa saja pihak yang melakukan pengawasan pengelolaan Dana BOS?	Yang mengawasi penggunaan anggaran Bos dari pihak internal sekolah ada komite dan Yayasan selain itu juga tim manajemen bos juga turut mengawasi penggunaan anggaran kalau dari Pihak eksternal yaitu dinas Pendidikan dan inspektorat
		Kapan dilakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Dana BOS?	Biasanya 1 bulan sekali saya akan menghadiri rapat MKKS yang juga dihadiri oleh pihak cabang dinas Pendidikan yang melakukan pembinaan-pembinaan terkait penggunaan Dana BOS, kemudian setiap 3 bulan sekali juga dinas pihak cabang dinas Pendidikan selaku pihak eksternal itu melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah penggunaan satu tahun terealisasi maka tim inspektorat akan memeriksa RKAS beserta bukti penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis.
		Bagaimana hasil dari pengawasan pengelolaan Dana BOS yang dilakukan oleh dinas pendidikan?	Hasilnya memang ya ada beberapa poin yang memang terkadang perlu dievaluasi ya kita mengikuti arahan dari cabang dinas tersebut, dan kita melakukan perbaikan sesuai evaluasi yang diberikan. setelah penggunaan satu tahun terealisasi maka tim inspektorat akan memeriksa RKAS beserta bukti penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis.
2.	Komite Sekolah	Bagaimana	Komite sekolah selalu melakukan

	(Bapak Suryanto, SE)	pengawasan pemanfaatan Dana BOS SMK Musda Perbaungan?	pengawasan meski tidak secara langsung dan terjadwal seperti cabang dinas pendidikan atau pihak lainnya. Bentuk pengawasan mengikuti perkembangan sekolah dari kegiatan belajar mengajar serta pemenuhan dalam pembelanjaan modal kebutuhan sekolah
		Kapan pelaksanaan pengawasan Dana BOS SMK Musda Perbaungan?	Pengawasan biasanya dilakukan minimal 1 bulan sekali maksimal 3 kali bulan dalam setahun itupun tidak terjadwal kapan dilaksanakannya hanya sekedar bentuk koordinasi. Pengawasan yang kami lakukan bersifat koordinasi terhadap pembelanjaan barang dan jasa yang dikelola pihak sekolah, agar pemanfaatannya sesuai yang diharapkan
3.	Bendahara Sekolah (Bapak Darwin Bangun, S.Si, S.Pd)	Siapa saja pihak yang melakukan pengawasan pengelolaan Dana BOS?	Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal yaitu Yayasan dan komite dan dari pihak eksternal ada dinas Pendidikan dan inspektorat.
		Apasajakah yang diawasi dalam penggunaan anaggaran?	Komponen yang dipantau saat dilakukan pengawasan yaitu RKAS BOS, dokumen LPJ yang didalamnya terdapat berbagai macam pembukuan dan bukti penggunaan anggaran.
4.	Kepala Tata Usaha	Bagaimana pengawasan penggunaan Dana BOS di	Pengawasan dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu inspektorat dan dinas pendidikan serta pihak internal yaitu yayasan dan komite sekolah.

	(Bapak Diki Irwanda, S.Pd)	SMK Musda Perbaungan?	
5.	Kepala Teknik Pemesinan (Bapak Sugeng Syahputra, S.T)	Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh tim manajemen BOS?	Dalam manajemen pengelolaan anggaran sekolah memiliki pengawasan baik itu dari pihak sekolah yaitu komite dan pihak yayasan maupun pihak luar sekolah seperti dinas Pendidikan dan inspektorat.



**TABULASI HASIL WAWANCARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH**

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Kepala Sekolah (Bapak Sulaiman, S.Kom)	Bagaimanakah proses laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS dan apasaja isi dalam LPJ tersebut?	Laporan pertanggung jawaban Dana sesuai dengan lampiran bukti-bukti pengeluaran Dana, Laporan singkat setiap kegiatan.dalam LPJ tersebut ada Bukti pengeluaran Dana, dokumentasi, seluruh arsip laporan keuangan BOS,buku kas umum, buku pembantu kas,buku pembantu tunai,buku pembantu bank, Buku pembantu Pajak semua berdasarkan juknis
		Kapan SMK Musda Perbaungan melaporkan pengelolaan Dana BOS?	Pelaporannya biasanya waktunya itu sudah terjadwal kita biasa 3 bulan sekali melapor ke cabang dinas propinsi sumatera utara.
2.	Komite Sekolah (Bapak Suryanto, SE)	Apakah sekolah melaporkan pengelolaan Dana BOS kepada Komite Sekolah?	Ya,Sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran BOS dengan prosedur pertanggungjawabannya mengacu pada ketentuan petunjuk teknis yang berlaku
3.	Bendahara Sekolah (Bapak Darwin Bangun, S.Si, S.Pd)	Bagaimanakah proses laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS dan apasaja isi dalam LPJ tersebut?	Sekolah menyusun laporan pengelolaan Dana Bos sesuai dengan format yang ditentukan yang didalamnya berisi RKAS, Buku kas umum, Buku kas tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu pajak. Serta semua lampiran dokumen yang dibutuhkan. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS di SMK Musda

			Perbaungan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri pendidikan,riset,kebudayaan dan teknologi
4.	Kepala Tata Usaha (Bapak Diki Irwanda, S.Pd)	Bagaimana laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan?	Pihak sekolah membuat pembukuan dari Dana yang diperoleh satuan pendidikan untuk program BOS dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
5.	Kepala Teknik Pemesinan (Bapak Sugeng Syahputra, S.T)	Bagaimana laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan?	Laporan pertanggungjawaban Dana BOS selalu disiapkan oleh sekolah sesuai dengan juknis yang berlaku di tahun ini karena karena sejauh ini SMK MUSDA selalu tertib administrasi

**TABULASI HASIL WAWANCARA
STANDAR MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH**

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Kepala Sekolah (Bapak Sulaiman, S.Kom)	Bagaimana pelaksanaan standar mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan?	Kalau pelaksanaan standar mutu kita ada tim penjamin mutu pendidikan sekolah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. dari disitulah semua nantinya bisa dilakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap guru-guru dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
		Standar mutu apa sajakah yang sudah meningkat di SMK MUSDA?	Standar mutu pendidikan yang sudah meningkat di SMK Musda Perbaungan adalah Standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, dan standar proses.
2.	Komite Sekolah (Bapak Suryanto, SE)	Bagaimana standar mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan?	Mutu pendidikan di sekolah sudah lebih,baik, saya sering berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga guru-guru tentang perkembangan sekolah yang saya lihat sudah ada peningkatan sarana prasarana dan meningkatnya kinerja guru-gurunya
3.	Bendahara Sekolah (Bapak Darwin Bangun, S.Si, S.Pd)	Bagaimana pelaksanaan standar mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan?	Kepala sekolah membentuk tim penjamin mutu pendidikan dan membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah (RKS). Sekolah sudah melakukan standar pembiayaan dengan baik, terbukti

			dari mulai perencanaan anggaran, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban dari sekolah yang sudah sesuai dengan petunjuk dan skala prioritas yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pelaporan dan keberlangsungan kegiatan di sekolah
		Standar mutu apa sajakah yang sudah meningkat di SMK MUSDA?	Mengenai standar mutu pendidikan yang sudah meningkat di SMK Musda Perbaungan adalah Standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, dan standard proses
4.	Kepala Tata Usaha (Bapak Diki Irwanda, S.Pd)	Bagaimana penggunaan Dana BOS terhadap standar mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan?	Menurut saya sekolah sudah melakukan standar proses, Standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, hal ini dapat kami rasakan dalam pemanfaatannya seperti terpenuhinya ATK untuk kebutuhan guru dan siswa. Disamping itu kebutuhan sarana prasarana sekolah terus melakukan pembenahan disana-sini untuk kenyamanan dan kemudahan yang dilakukan didalam lingkungan sekolah
5.	Kepala Teknik Pemesinan (Bapak Sugeng Syahputra, S.T)	Bagaimana penggunaan Dana BOS terhadap standar mutu pendidikan di SMK Musda Perbaungan?	Standar mutu pendidikan di sekolah sudah dilakukan dengan baik, seperti pada standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah berupaya mendukung secara penuh dalam pengembangan empat standar ini.

**TABULASI HASIL WAWANCARA
PENGELOLAAN DANA BOS DALAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN SEKOLAH**

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Kepala Sekolah (Bapak Sulaiman, S.Kom)	Bagaimana pengelolaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan?	SMK Musda Perbaungan mengelola Dana BOS dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berarti bahwa sekolah memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
		Apakah yang menjadi fokus utama dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK MUSDA?	Fokus saat ini pada peningkatan di bidang sarana dan prasarana difokuskan kepada pembelian alat dan bahan praktek, media pembelajaran yang dibutuhkan dan workshop peningkatan kompetensi guru dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri seperti PT. Rotella Persada Mandiri, PT. Astra International dan tempat kerja yang relevan dengan masing-masing bidang keahlian agar dapat menghasilkan mutu pendidikan yang kompeten pada masing-masing bidang keahlian
		Bagaimana cara meningkatkan indikator nilai rapor mutu sekolah yang masih rendah dibidang literasi dan numerasi?	Upaya yang kami lakukan adalah meningkatkan kesadaran siswa untuk pembiasaan literasi dengan cara mencanangkan program gerakan literasi sekolah dengan membaca buku selama 15 menit di jam pertama kemudian mengambil kesimpulan dari hasil bacaannya, menambah koleksi buku di perpustakaan dan meningkatkan layanan internet agar siswa juga bisa

			mencari dan membaca materi dari sumber yang lain dari gawainya. Guru memberikan latihan tambahan tentang soal AKM numerasi beserta pembahasannya agar kemampuan numerasi siswa meningkat dan bisa mengerjakan soal numerasi dengan baik.”
2	Komite Sekolah (Bapak Suryanto, SE)	Bagaimana pengelolaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan?	Sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan dalam meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana sekolah, kegiatan peningkatan mutu guru ataupun kelengkapan media pembelajaran
3.	Bendahara Sekolah (Bapak Darwin Bangun, S.Si, S.Pd)	Bagaimana pengelolaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan?	Pengelolaan Dana BOS di SMK MUSDA menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
		Apakah yang menjadi fokus utama dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK MUSDA?	Yang pertama difokuskan kepada peningkatan sarana dan prasarana sekolah dengan melengkapi alat dan bahan praktek,serta media pembelajaran.Selanjutnya Peningkatan Standar PTK difokuskan pada Dana kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru secara internal yaitu pengalokasian Dana untuk melaksanakan kegiatan workshop,sosialisasi dan in house training (IHT) sedangkan untuk

			eksternal, mengirim guru-guru produktif untuk melaksanakan peningkatan kompetensi baik dari lembaga pemerintah yaitu di P4TK, LPMP, LSP serta bekerjasama dengan lembaga Dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) seperti di PT. Astra Internasional, PT. Rotella Persada Mandiri dan tempat relevan lainnya.
4.	Kepala Tata Usaha (Bapak Diki Irwanda, S.Pd)	Bagaimana pengelolaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan?	Saat ini saya lihat sekolah mengalami peningkatan dalam bidang mutu pendidikan, banyaknya siswa yang mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, futsal, paskibraka, kegiatan praktek otomotif, komputer. Adanya kegiatan workshop untuk dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu peningkatan kesejahteraan juga diperhatikan oleh pihak sekolah dengan memasukkan usulan kenaikan gaji dalam perencanaan anggaran Dana BOS
5.	Kepala Teknik Pemesinan (Bapak Sugeng Syahputra, S.T)	Bagaimana pengelolaan Dana BOS SMK Musda Perbaungan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan?	Sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk penggunaan Dana BOS. Bisa kita lihat siswa kita banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan mengutuskan siswa-siswa di masing-masing jurusan untuk mengikuti lomba kegiatan sekolah (LKS), Pelaksanaan workshop peningkatan mutu pendidikan, mengirim perwakilan guru produktif untuk mengikuti pelatihan sebagai asesor, terjalannya kerjasama dengan

			dunia usaha dan dunia industri yang relevan dengan masing-masing bidang keahlian. Semua ini tak terlepas dari efektif dan efisiennya pengelolaan anggaran Dana BOS di SMK Musda Perbaungan. Jadi apabila pengelolaannya tepat maka mutu pendidikan pasti akan meningkat
--	--	--	---



LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. SMK Musda Perbaungan (Photo sekolah)



Gambar 2. Ruangan Kepala Sekolah SMK Musda Perbaungan



Gambar 3. Ruang Guru SMK Musda Perbaungan



Gambar 4. Ruang Tata Usaha SMK Musda Perbaungan



Gambar 5. Ruang Perustakaan SMK Musda Perbaungan



Gambar 6. Ruang Praktik Teknik Sepeda motor SMK Musda Perbaungan



Gambar 7. Ruang Lab. Komputer SMK Musda Perbaungan



Gambar 8. Ruang UKS SMK Musda Perbaungan



Gambar 9. Ruangan Bimbingan Konseling SMK Musda Perbaungan



Gambar 10. Ruang Kelas SMK Musda Perbaungan



Gambar 11. Halaman / Lapangan SMK Musda Perbaungan



Gambar 12. Prestasi / Kegiatan Siswa I SMK Musda Perbaungan



Gambar 13. Prestasi / Kegiatan Siswa II SMK Musda Perbaungan



Gambar 14. Prestasi / Kegiatan Siswa III SMK Musda Perbaungan



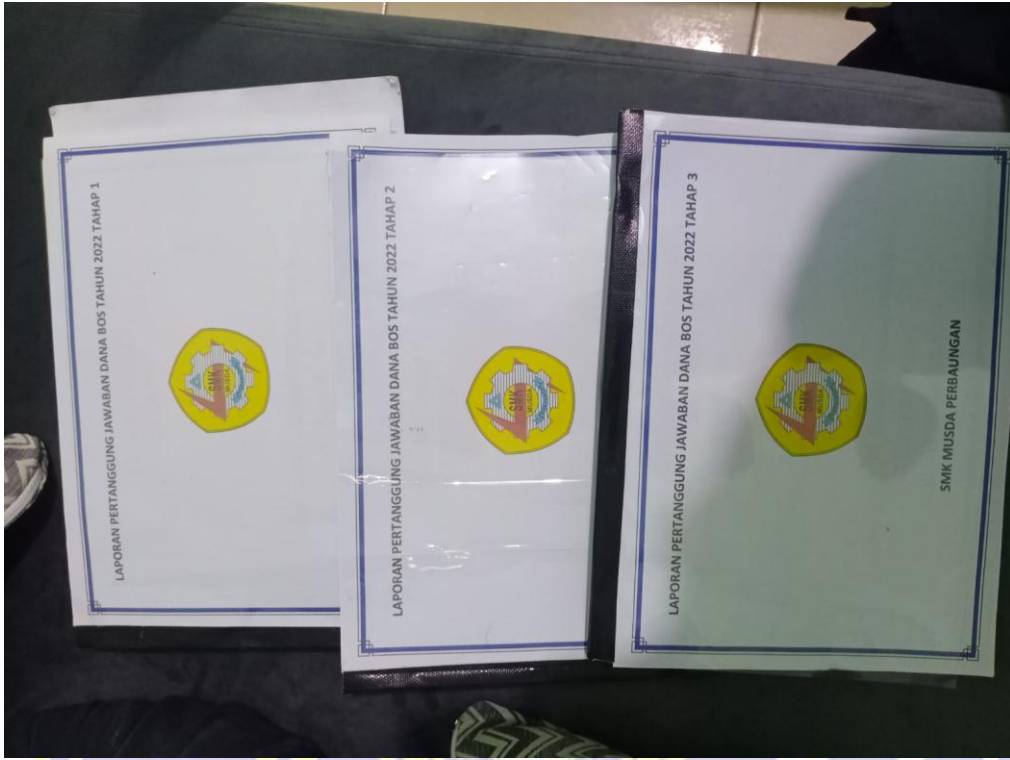
Gambar 15. Prestasi / Kegiatan Siswa IV SMK Musda Perbaungan



Gambar 16. Prestasi / Kegiatan Siswa III SMK Musda Perbaungan



Gambar 17. Lemari Piala I SMK Musda Perbaungan



Gambar 18. Berkas LPJ BOS SMK Musda Perbaungan



KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 10209402
 Nama Sekolah : SMKS MUSDA PERBAUNGAN
 Alamat : JL. PEMATANG SIANTAR KM. 39,9 KEL. TUALANG PERBAUN, Kec. Perbaungan
 Kabupaten : Kab. Serdang Bedagai
 Provinsi : Prop. Sumatera Utara
 Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOS Regular	2.424.000.000
Total Penerimaan		2.424.000.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Triwulan			
				Volume	Satuan	Tarif Harga		1	2	3	4
1.		02.	Pengembangan Standar Isi				22.846.000	0	0	22.846.000	0
2.		02.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				22.846.000	0	0	22.846.000	0
3.		02.06.01.	Workshop validasi RPP semua mapel dalam MGMP/SGMPK				22.846.000	0	0	22.846.000	0
4.	5.1.02.01.01.0024	02.06.01.	Bahan Sosialisasi	80	OH	75.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0
5.	5.1.02.01.01.0024	02.06.01.	Isi Staples Kecil	24	Buah	4.000	96.000	0	0	96.000	0
6.	5.1.02.01.01.0026	02.06.01.	Spanduk [Bt: 1.00]	1	Buah	150.000	150.000	0	0	150.000	0
7.	5.1.02.01.01.0052	02.06.01.	Konsumsi Snack Panitia, Peserta dan Narasumber	320	OH	18.000	5.760.000	0	0	5.760.000	0
8.	5.1.02.01.01.0052	02.06.01.	Konsumsi Makan Siang	320	OH	27.000	8.640.000	0	0	8.640.000	0

Kertas Kerja per Triwulan - NPSN : 10209402, Nama Sekolah : SMKS MUSDA PERBAUNGAN Halaman 1 dari 23

Gambar 19. RKAS SMK Musda Perbaungan

BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2022

NPSN : 10209402
 Nama Sekolah : SMKS MUSDA PERBAUNGAN
 Desa/Kecamatan : JL. PEMATANG SIANTAR KM. 39,9 KEL. TUALANG PERBAUN, Kec. Perbaungan
 Kabupaten / Kota : Kab. Serdang Bedagai
 Provinsi : Prop. Sumatera Utara
 Sumber Dana : BOS Regular

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-2022				Saldo Kas Bank Bulan Januari 2022		0	0
01-02-2022				Saldo Kas Tunai Bulan Januari 2022		0	0
28-02-2022				Bunga Bank		0	0
28-02-2022				Pajak Bunga		0	0
Jumlah						0	0

Pada hari ini Senin 28 Februari 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 0

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 0
- Saldo Kas Tunai : Rp. 0

Jumlah : Rp. 0

Mengetahui,
Kepala Sekolah
SULAIMAN, S.Kom
NIP. 0

Perbaungan, 28 Februari 2022
Bendahara,
DARWIN BANGUN
NIP. 0

BKU Februari 2022 - NPSN : 10209402, Nama Sekolah : SMKS MUSDA PERBAUNGAN Halaman 1 dari 1

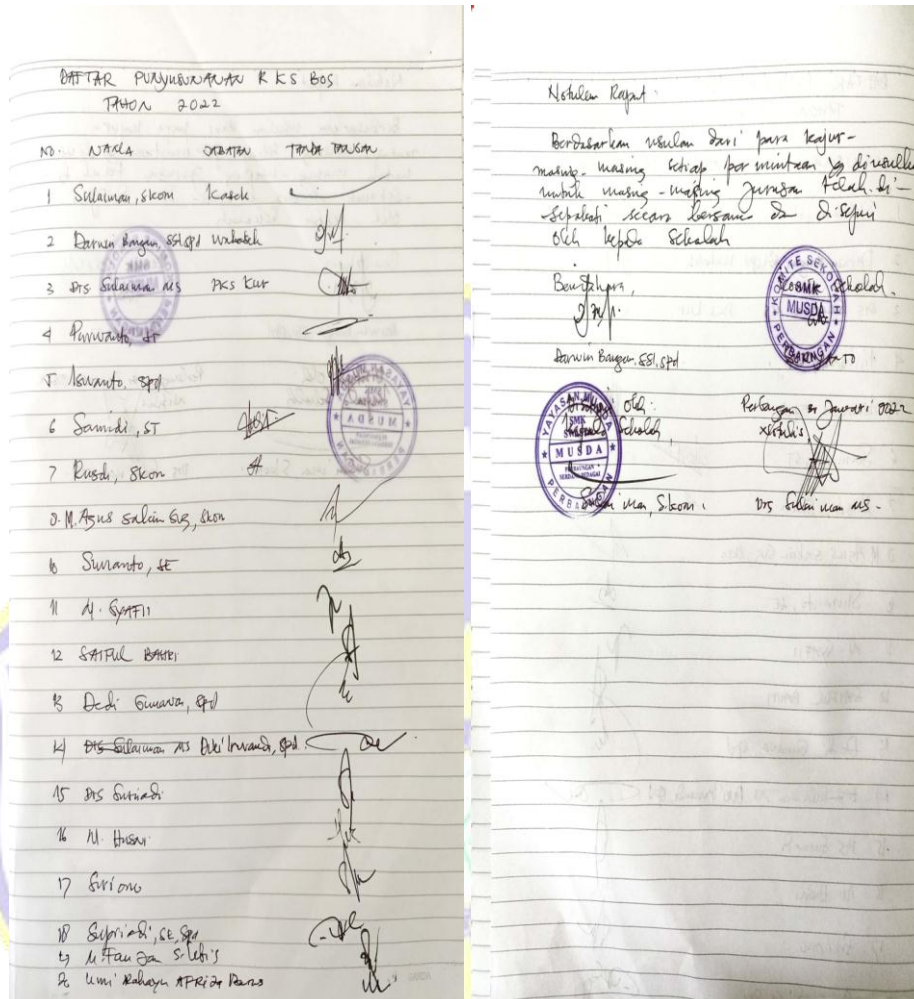
Gambar 20. BKU SMK Musda Perbaungan



Gambar 21. Wawancara dengan Bendahara BOS SMK Musda Perbaungan



Gambar 22. Wawancara dengan kepala sekolah SMK



Gambar 23. Notulen rapat RKS 2022



Gambar 24. Wawancara dengan Guru dan KTU



Gambar 25. Ruang kelas SMK Musda Perbaungan



Gambar 26 Struktur Organisasi TPMS



Gambar 27 Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan



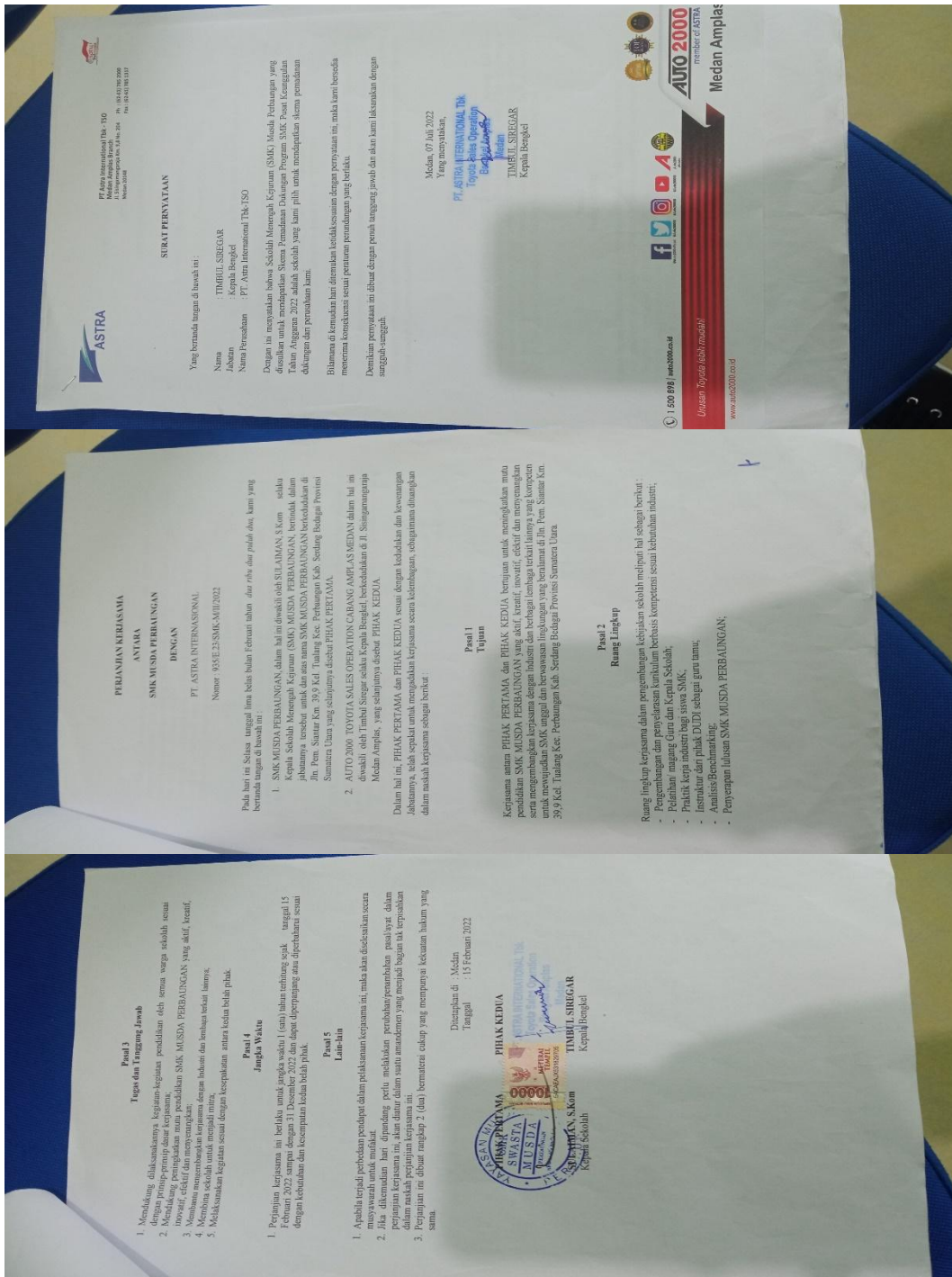
Gambar 28. Workshop Validasi RPP



Gambar 29. Pelatihan Asesor Kompetensi



Gambar 30. Program Pelatihan Industri



Gambar 31. MOU PT Astra International TBK-TSO

DAFTAR PRESTASI SISWA
SMK MUSDA PERBAUNGAN
TP. 2018/2019

N O	NAMA SISWA	PERLOMBAAN	TINGKAT	JUARA	TAHUN
1	Rindiyani	IT Software	Kabupaten	1	2018
2	Erlangga	IT Network	Kabupaten	2	2018
3	M.Yusuf	Design Graphics	Kabupaten	2	2018
4	Intan Ramadhani	Menyanyi	Kabupaten	1	2018

Perbaungan, 02
September 2018

Bidang Pembinaan
Prestasi

Mhd. Fauzan Syaafi
S Lubis, S.Pd

DAFTAR PRESTASI SISWA
SMK MUSDA PERBAUNGAN
TP. 2019/2020

N O	NAMA SISWA	PERLOMBAAN	TINGKAT	JUARA	TAHUN
1	Fahrozi	FUTSAL	Kabupaten	1	2019
2	Erlangga	FUTSAL			
3	M.Rizky	FUTSAL			
4	Rizky Nayaka	FUTSAL			
5	Wira	FUTSAL			
6	Anggara	FUTSAL			
7	Aditya Winanda	FUTSAL			
8	Iqbal	FUTSAL			
9	Fikri	FUTSAL			
10	Nico	FUTSAL			
11	Randi Irawan	FUTSAL			

Perbaungan, 23
September 2019

Bidang Pembinaan
Prestasi

Mhd. Fauzan Syaufi
S Lubis, S.Pd

DAFTAR PRESTASI SISWA
SMK MUSDA PERBAUNGAN
TP. 2020/2021

N O	NAMA SISWA	PERLOMBAAN	TINGKAT	JUARA	TAHUN
1	Dirga	IT Network	Kabupaten	3	2020
2	Fahri Anggara	IT Network	Kabupaten	2	2020
3	Wahyu	Design Graphics	Kabupaten	2	2020
4	Rski Ramadhan	Design Graphics	Kabupaten	3	2020

Perbaungan, 29
September 2020

Bidang Pembinaan
Prestasi

Mhd. Fauzan Syaufi
S Lubis, S.Pd

DAFTAR PRESTASI SISWA
SMK MUSDA PERBAUNGAN
TP. 2021/2022

N O	NAMA SISWA	PERLOMBAAN	TINGKAT	JUARA	TAHUN
1	Indah	TARI	Kabupaten	1	2022
2	Wahyuni				
3	Devi				
4	Dika				
5	Nuraini				
6	Suci Ramadhani				
7	Tri Anisa				
8	Putri Ayu				

Perbaungan, 03 Maret
2022

Bidang Pembinaan
Prestasi

Mhd. Fauzan Syauffi
S Lubis, S.Pd

DAFTAR PRESTASI SISWA
SMK MUSDA PERBAUNGAN
TP. 2022/2023

N O	NAMA SISWA	PERLOMBAAN	TINGKAT	JUARA	TAHUN
1	Rizky Rahmadani	IT Software	Kabupaten	1	2020
2	Irma Handayani	IT Network	Kabupaten	2	2020
3	M.Ridho	Design Graphics	Kabupaten	2	2020
4	Putri	IT Web	Kabupaten	Harapan 1	2021
5	Rindi Atika	IT Software	Provinsi	Harapan 1	2021
6	Suci	IT Network	Provinsi	Harapan 1	2021
7	Tim Futsal	FUTSAL	Kabupaten	1	2022

Perbaungan, 02
September 2022

Bidang Pembinaan
Prestasi

Mhd. Fauzan Syaafi
S Lubis, S.Pd